



Kementerian Imigrasi dan Pemasaran
Direktorat Jenderal Imigrasi

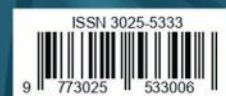
BHUMI PURA

CITA CITRA GERBANG NEGARA

Volume 11/Edisi 05/Oktober 2024 | imigrasi.go.id/majalah
MAJALAH MEDIA KEIMIGRASIAN

LEGASI BAGI IMIGRASI

Direktorat Jenderal Imigrasi meletakkan dasar-dasar keimigrasian melalui terbitnya 234 produk hukum yang mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan penegakan kedaulatan wilayah.



Layanan Paspor



Biaya

Pelayanan PNBP percepatan	: Rp 1 juta
Paspor biasa 48 hlm.	: Rp 350 ribu
Paspor elektronik 48 hlm.	: Rp 650 ribu

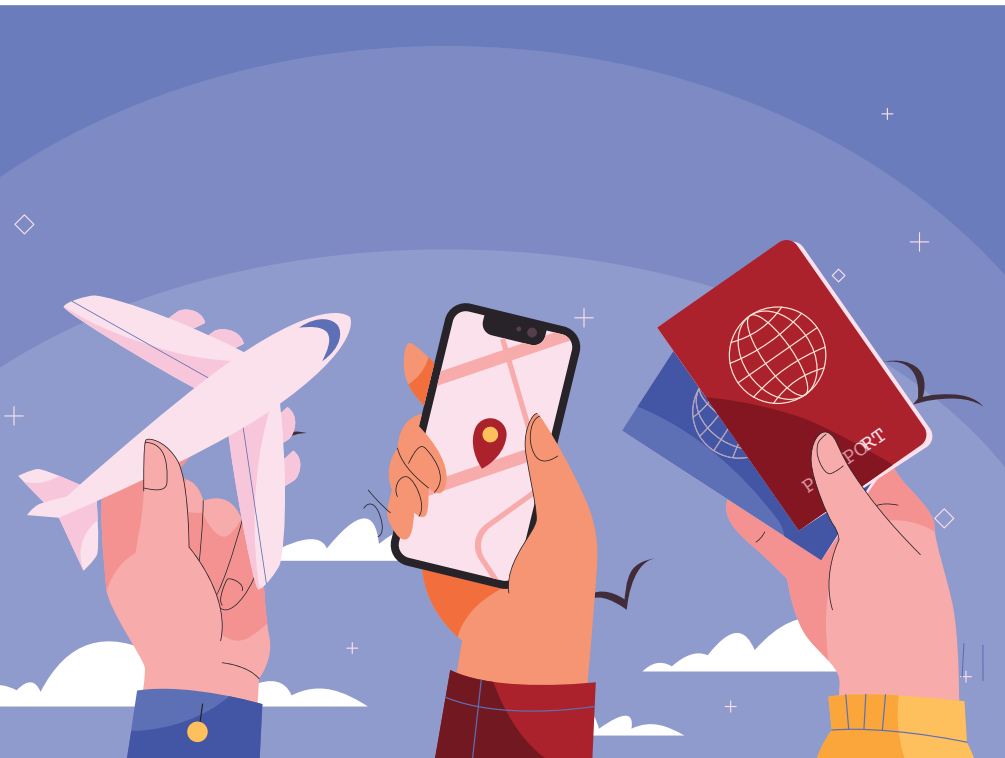
Syarat

1. Kartu tanda penduduk (KTP)
2. Kartu keluarga (KK)
3. Akta kelahiran/akta perkawinan/
buku nikah/ijazah/surat baptis

Prosedur

1. Datang langsung ke kantor imigrasi tanpa melalui aplikasi M-Paspor maksimal pukul 10 pagi.
2. Isi formulir permohonan paspor serta lampirkan dokumen persyaratan.
3. Serahkan berkas permohonan paspor untuk diperiksa oleh petugas imigrasi.
4. Tunggu berkas permohonan diinput oleh petugas imigrasi.
5. Ikuti proses foto dan wawancara.
6. Lakukan pembayaran di bank.
7. Dapatkan paspor yang telah diterbitkan.

Silakan **hubungi** kantor imigrasi terdekat
untuk informasi lebih lanjut



LEGASI BAGI IMIGRASI

Bulan Oktober 2024 menjadi momentum bersejarah karena Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bergabung dengan Ditjen Pemasarakatan sebagai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang terpisah dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pada bulan yang sama, Silmy Karim yang telah 22 bulan menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi menjalankan amanat baru sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Dalam kurun waktu tersebut, Silmy Karim telah meletakkan dasar-dasar transformasi keimigrasian melalui terbitnya 234 produk hukum, baik dalam bentuk (revisi) undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Hukum dan HAM, maupun standar operasional prosedur (SOP). Manfaat dari legasi yang diberikan Silmy Karim akan terus dirasakan oleh generasi di masa depan.

Bulan pertama triwulan IV tahun 2024 menjadi bulan yang produktif, yaitu ketika inovasi dan prestasi hadir susul-menyusul. Sebut saja peresmian Immigration Lounge di Senayan City dan Mall Taman Angrek, kerja sama dengan VFS Global untuk pengajuan *visa on arrival* bagi orang asing, serta *autogate* yang kini sudah bisa digunakan oleh anak-anak mulai usia 6 tahun.

Inovasi-inovasi itu diiringi dengan sejumlah prestasi di bidang penegakan hukum. Prestasi tersebut, antara lain adalah penangkapan obligator BLBI Marimutu Sinivasan, operasi Jagratara, hingga penangkapan seorang buron internasional asal Filipina.

Edisi kelima ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berbagi gagasan tentang wisata seks anak (*child sex tourism*) di rubrik Opini serta fenomena boneka Labubu yang mendunia dan ramai diperebutkan. Tampaknya, edisi kali ini juga menjadi edisi terakhir majalah *BhumiPura* yang terbit sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca, Sahabat Mido!



cerita sampul

Silmy Karim telah meletakkan dasar-dasar transformasi keimigrasian melalui terbitnya 234 produk hukum. Hal tersebut menjadi legasi berharga yang akan terus dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang.

PENGARAH

Direktur Jenderal Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

PEMIMPIN REDAKSI

Ketua Tim Humas Ditjen Imigrasi

SEKRETARIS REDAKSI

Penanggung Jawab Pengelolaan Informasi Publik Ditjen Imigrasi

ANGGOTA REDAKSI

Ade Irma Stefi Ulil Amri, Ajeng Dhyanti Paramitha, Ajeng Rahma Safitri, Arif Rahman Suryaman, Elyan Nadian Zahara, Faris Agung Wicaksono, Fipit Fatimah, Mayza Fairda, Muhammad Fajar Sulistyio, Ningsi Demanto, Putri Obara, Riski Amalia, Rr. Aditya Citrainingtyas Ningrum, Yanos Okterano, Yolanda Rosylvia Juniar

PENYUNTING BAHASA

Tim Narabahasa

PENATA LETAK & DESAIN

Tim Narabahasa

PERCETAKAN

Tim Narabahasa

SIRKULASI

Tim Kerja Humas Ditjen Imigrasi

ALAMAT REDAKSI

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Lt. 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan

KONTAK REDAKSI

majalah.bhumipura@imigrasi.go.id

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Tulisan/ artikel yang dimuat akan mendapatkan honor sesuai standar yang berlaku.

DARI REDAKSI

3. Legasi bagi Imigrasi

LAPORAN UTAMA

8. Legasi untuk Imigrasi Indonesia

LIPUTAN KHUSUS

12. Imigrasi Entikong Gagalkan Pelarian Subjek Cegah Kemenkeu

KEBIJAKAN

14. Desa Binaan: Membuka Cakrawala Keimigrasian
15. Risiko Kerja Tinggi, Mekanisme Penggunaan Senjata Api Petugas Imigrasi Diatur
16. Anak Usia 6 Tahun Sudah Bisa Gunakan Autogate Imigrasi

INFOGRAFIK

17. Paspor Elektronik di 11 Perwakilan RI di Luar Negeri

KERJA KITA

18. 1.293 Orang Asing Diperiksa dalam Operasi Jagratara, 185 Diproses Hukum
19. Situs Web Ramah Disabilitas: Imigrasi Hadirkan Aksesibilitas Lebih Baik
20. Kerja Sama Otoritas Indonesia dan Filipina: Tiga Buron Pemerintah Filipina Ditangkap, Satu Masih Diburu
22. Digitalisasi Layanan Keimigrasian: Ditjen Imigrasi Bekerja Sama dengan VFS Global
23. Kuartal III Baru Mulai, Imigrasi Capai Target Rp6 Triliun PNBP Lebih Awal
24. Imigrasi Tertibkan Penyalahgunaan Visa dan ITAS Investor
25. Trade Expo Indonesia 2024: Tarik Investor Asing Berkualitas dengan *Golden Visa*
26. Ratusan WNA Dideportasi, Ribuan Masuk Daftar Cekat Ditjen Imigrasi

KILAS PERISTIWA

28. Kerja Sama Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung: Tingkatkan Kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil



38. Opini

Nestapa di Balik Surga Wisata

PENYESUAIAN TARIF PASPOR, PILIH SESUAI KEBUTUHANMU

Melalui PP No. 45 Tahun 2024, pemerintah menyesuaikan tarif paspor setelah 2 tahun masa uji coba paspor masa berlaku 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk **peningkatan layanan dan kemudahan pilihan paspor** bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku paspor.



Penyesuaian Tarif Paspor

Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 yang mengatur masa berlaku paspor 5 tahun dan 10 tahun

- | | |
|---|------------------|
| 1. Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 5 tahun | Rp350.000 |
| 2. Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 10 tahun | Rp650.000 |
| 3. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun | Rp650.000 |
| 4. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun | Rp950.000 |

Kebijakan tersebut akan berlaku mulai tanggal **17 Desember 2024**

“ Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku paspor sehingga masyarakat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kami pastikan penyesuaian tarif ini tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengimbangnya dengan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan. - **Saffar M. Godam, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi** ”





- 29. Kompas Travel Fair 2024: Layanan Pembuatan Paspor Hadir Kembali
- 30. Efisien dan Responsif, Pembuatan Paspor Bisa Dilakukan di 3 Mal Ini
- 31. Trade Expo Amazing Indonesia in Jeddah: Imigrasi Sasar Elite Dunia Berkualitas
- 32. Seminar dan Library Award 2024: Menuju Pusat Literasi Keimigrasian

INSPIRASI

- 34. Chandra Dinata, Berjaga dengan Dedikasi dan Integritas di Batas Negara

INFORMATIPS

- 36. Sebelum Masuk ke Indonesia, Pendetang Wajib Laporkan Barang dan Kondisi Kesehatan

OPINI

- 38. Nestapa di Balik Surga Wisata
- 40. Menilik Sejarah dan Filosofi Imigrasi: Ini tentang Negara

POJOKKOMUNIKASI

- 42. Labubu Diburu: Ruang Interaksi Makna dalam Budaya Populer

RENJANA

- 44. Pulau Senua, Permata Tersembunyi di Indonesia Bagian Utara

KABAR DARI SEBERANG

- 46. Kehadiran e-Paspor di Sydney dan Kabar Golden Visa dari Washington D.C.

RESENSI

- 48. Jalani Pencarian Kebahagiaan dalam Bersorak Bahagia

49. MATA Lensa
50. KOMIK



BhumiPura adalah media internal yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Majalah ini menyajikan berita dan tulisan seputar keimigrasian secara aktual, mendalam, dan informatif. BhumiPura saat ini dapat dibaca atau diunduh melalui imigrasi.go.id/majalah.

Sekarang Masa Berlaku Paspor Sudah 10 Tahun!



LEGASI UNTUK IMIGRASI INDONESIA

Transformasi peraturan keimigrasian menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Dirjen Imigrasi Silmy Karim telah menggagas sejumlah peraturan yang menjadi sendi-sendi transformasi keimigrasian. Dengan berbagai upaya inovatif tersebut, Imigrasi senantiasa diperkuat untuk menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat dan menegaskan kedaulatan wilayah.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara

Tanggal 20 Oktober menjadi hari bersejarah bagi Imigrasi Indonesia. Silmy Karim menggenapi 1 tahun 10 bulan perjalanannya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi ke-18. Dalam kurun waktu tersebut, Silmy telah meletakkan sendi-sendi transformasi keimigrasian melalui sejumlah peraturan yang digagas semasa ia menjabat. Dalam artikel ini, *BhumiPura* merangkum rekam jejak 1 tahun 10 bulan Silmy Karim dalam berkorporasi sebagai Dirjen Imigrasi.

Dukungan bagi Jemaah Umrah dan PMI

Silmy Karim resmi dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada Rabu (4/1/2023). Pada saat itu, Silmy sebagai Purnatugas Direktur Utama Krakatau Steel meminta dukungan semua pihak untuk melaksanakan tugasnya dalam menjadikan Imigrasi Indonesia lebih baik. Silmy juga menyampaikan harapannya agar Imigrasi Indonesia lebih maju dengan terus melanjutkan inovasi untuk memberikan pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat luas.

Pencabutan rekomendasi kementerian terkait untuk pengurusan paspor umrah dan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi kebijakan

pertama yang Silmy gagas melalui Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0252 Tahun 2023. Silmy menjelaskan bahwa dicabutnya syarat rekomendasi kementerian terkait bukan berarti Imigrasi tidak melakukan pengawasan.

"Imigrasi akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemohon paspor yang diduga dapat melakukan penyalahgunaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor imigrasi serta tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) melalui wawancara singkat oleh petugas," ujar Silmy. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi juga tetap memberikan dukungan bagi para PMI. Salah satunya adalah dengan kebijakan paspor tarif nol rupiah bagi PMI pertama kali. Pencabutan syarat rekomendasi tersebut telah dibahas dengan pihak terkait, salah satunya saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) pada Selasa (21/2/2023).

"Intinya, jangan sampai kita mempersulit masyarakat, baik yang ingin menjalankan ibadah maupun bekerja di luar negeri sehingga mereka mencari-cari 'cara' lain. Ini untuk mewujudkan tata kelola pelayanan di bidang keimigrasian yang lebih baik, efektif, efisien, cepat, dan sesuai



dengan dinamika dunia yang cepat berubah,” ucap Silmy.

Visa Tanpa Rekomendasi

Kebijakan permohonan visa tanpa rekomendasi juga diberlakukan untuk visa tinggal terbatas bagi calon mahasiswa dan tenaga pengajar di perguruan tinggi dari luar Indonesia.

Ditjen Imigrasi resmi memperkenalkan visa pendidikan versi baru di acara Festival Imigrasi “Imifest” yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada Selasa (12/9/2023). Dengan visa pendidikan ini, warga negara asing (WNA) yang ingin menempuh pendidikan di Indonesia

tidak perlu lagi melampirkan surat rekomendasi dari kementerian terkait untuk memperoleh visa, tetapi cukup melampirkan bukti penerimaan siswa/mahasiswa dari institusi pendidikan.

Pelajar atau mahasiswa asing bisa disponsori baik oleh WNI perorangan maupun lembaga pendidikannya. Hal ini yang membedakan visa pendidikan baru dengan visa pendidikan sebelumnya.

Kemudahan ini diterapkan untuk mendukung Indonesia sebagai salah satu tujuan pelajar internasional. Bukti penerimaan pelajar asing pada lembaga pendidikan di Indonesia yang dilampirkan oleh pemohon juga wajib mencantumkan jangka waktu pendidikan yang akan ditempuh.

Kebijakan ini diikuti dengan sederet kebijakan lain di bidang visa.

SILMY JUGA MENYAMPAIKAN HARAPANNYA AGAR IMIGRASI INDONESIA LEBIH MAJU DENGAN TERUS MELANJUTKAN INOVASI UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT.

Pelantikan Silmy Karim sebagai direktur jenderal Imigrasi oleh Menkumham Yasonna H. Laoly (Foto: Arif Rahman Suryaman)





Ilustrasi WNA yang akan datang ke Indonesia (Sumber: freepik.com)

Kebijakan-kebijakan itu, antara lain, kebijakan visa *multiple entry* 5 tahun serta visa olahraga dan musik. Kebijakan visa *multiple entry* 5 tahun dengan indeks D1 dan D2 yang diberlakukan sejak 20 Desember 2023 bertujuan memudahkan orang asing masuk ke Indonesia dengan tujuan bisnis dan wisata. Visa *multiple entry* dengan indeks D1 dapat digunakan untuk tujuan wisata, sedangkan indeks D2 digunakan untuk tujuan bisnis. Kedua jenis visa ini diberikan dengan masa tinggal sampai 60 hari untuk setiap kedatangan.

Dirjen Imigrasi juga menggagas perubahan kategori visa olahraga dan musik yang sebelumnya merupakan visa tinggal terbatas menjadi visa kunjungan serta menyederhanakan persyaratannya. Visa olahraga termasuk dalam kategori visa kunjungan satu kali perjalanan untuk tinggal di Indonesia selama 60 hari dan dapat diperpanjang.

Skema visa tersebut telah disederhanakan dari versi sebelumnya dengan peruntukan yang sama. Saat ini, atlet maupun tim resmi tidak perlu melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait untuk mengikuti kegiatan olahraga atas undangan pemerintah Indonesia, kejuaraan

olahraga internasional, atau kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh organisasi keolahragaan internasional. Visa olahraga bagi atlet dan tim resmi bisa diajukan melalui situs evisa.imigrasi.go.id sejak 28 September 2023.

Silmy optimistis bahwa dengan penyederhanaan persyaratan ini, Indonesia bisa menggelar lebih banyak acara olahraga atau pertunjukan musik berskala internasional. Berkaca dari suksesnya Asian Games 2018, Silmy berharap Indonesia menjadi magnet bagi wisatawan asing untuk datang menyaksikan pertandingan olahraga internasional maupun konser musik.

Penerapan Bridging Visa

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 mengenai visa dan izin tinggal menjadi dasar berlakunya izin tinggal peralihan (*bridging visa*). *Bridging visa* merupakan jembatan antara izin tinggal sebelumnya sampai memperoleh izin tinggal baru.

WNA pemegang izin tinggal kunjungan elektronik dimungkinkan untuk memperoleh izin tinggal terbatas (ITAS) tanpa harus keluar dari wilayah Indonesia. Begitu juga pemegang

izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap (ITAP) yang sudah tidak bisa lagi memperpanjang. Mereka dapat memperoleh izin tinggal baru tanpa harus keluar dari wilayah Indonesia.

Izin tinggal tersebut dapat digunakan oleh WNA yang akan mengajukan alih status ke izin tinggal terbatas. WNA pemegang izin tinggal peralihan tidak dikenakan tinggal lajak (*overstay*) jika permohonan izin tinggal peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir.

Masa berlaku izin tinggal peralihan yakni 60 hari dan hanya berlaku secara *onshore*, yaitu bagi WNA yang sudah berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila WNA keluar dari wilayah Indonesia atau izin tinggal barunya telah terbit. WNA yang ingin menggunakan izin tinggal peralihan harus mengajukan permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran biaya keimigrasian paling lambat tiga hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis.

Peluncuran Golden Visa

Masih seputar kebijakan visa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan *golden visa* pada Kamis

“INTINYA, JANGAN SAMPAI KITA MEMPERSULIT MASYARAKAT, BAIK YANG INGIN MENJALANKAN IBADAH MAUPUN BEKERJA DI LUAR NEGERI SEHINGGA MEREKA Mencari-Cari ‘CARA’ LAIN.”

(25/7) di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa *golden visa* memberikan kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian Indonesia.

Silmy menjabarkan, pemegang *golden visa* diharapkan dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Manfaat tersebut di antaranya jangka waktu tinggal hingga 10 tahun, akses jalur prioritas pelayanan keimigrasian di bandara internasional, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus izin tinggal terbatas ke kantor imigrasi.

Seluruh pemohon *golden visa* wajib menyatakan komitmennya untuk berinvestasi secara langsung di Indonesia. Bentuk investasi ditentukan berdasarkan profil pemohon *golden visa*, yakni investor perorangan/investor korporasi, dengan tujuan mendirikan perusahaan baru atau tidak.

Inovasi Layanan Paspor

Tidak hanya visa, sejumlah inovasi di bidang layanan juga diluncurkan. Layanan tersebut di antaranya Immigration Lounge dan Layanan Paspor Akhir Pekan bagi masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Pelayanan ini khusus untuk masyarakat yang memerlukan paspor dalam keadaan mendesak, misalnya untuk berobat atau dinas ke luar negeri. Proses pengurusan paspor, foto, dan penerbitan paspor bisa selesai pada hari yang sama.

Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) pada saat ini baru tersedia di beberapa kantor imigrasi di Jakarta, yaitu Lippo Mall Puri, Pasar Pagi Mangga Dua, Pondok Indah Mall 3, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Plaza Semanggi, dan Cibubur Junction. Selain di UP3, masyarakat juga bisa mengurus paspor pada akhir pekan di Immigration Lounge yang tersedia di

Pondok Indah Mall 3, Senayan City, dan Mall Taman Angrek.

Immigration Lounge disediakan untuk melayani pembuatan paspor satu hari jadi untuk WNI serta perpanjangan *visa on arrival* (VoA) untuk WNA. Masyarakat yang akan mengurus paspor di Immigration Lounge pada hari Senin sampai dengan Jumat harus mendaftar melalui M-Paspor. Sementara itu, layanan datang langsung hanya tersedia pada hari Sabtu dan Minggu. WNA yang akan mengurus perpanjangan VoA harus mendaftar melalui immilounge.com/wna/.

Perluasan Jangkauan Layanan e-Paspor

Selama Silmy menjabat, ada pula perluasan jangkauan layanan paspor elektronik (e-paspor). Layanan ini tersedia di 126 kantor imigrasi se-Indonesia serta 11 perwakilan RI di luar negeri. Perluasan ini untuk menyikapi tingginya kebutuhan masyarakat akan paspor elektronik. WNI yang tinggal di luar negeri kini dapat mengajukan permohonan paspor elektronik di 11 perwakilan RI yang sistem penerbitannya telah terintegrasi dengan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian). Sebanyak 11 perwakilan RI tersebut di antaranya Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan),

Den Haag (Belanda), Jeddah (Arab Saudi), Los Angeles (Amerika Serikat), Berlin (Jerman), Sydney (Australia), Beijing (Tiongkok), dan Songkhla (Thailand).

Selain itu, ada penambahan tujuh kantor imigrasi sehingga jumlah kantor imigrasi saat ini adalah 133. Jumlah ini meningkat 10 persen dari satu dekade sebelumnya pada 2015, yakni sebanyak 121 kantor imigrasi. Tujuh kantor imigrasi tersebut di antaranya Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Mandailing Natal, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bungo, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kotawaringin Barat, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bontang, serta Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Balangan.

Selain peluncuran *golden visa* menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Ditjen Imigrasi juga memeriahkan perayaan 17 Agustus dengan menyematkan warna bendera kebangsaan Indonesia dalam desain baru paspor Republik Indonesia. Desain baru dengan fitur dan pengamanan mutakhir dimaksudkan untuk menghindari upaya pemalsuan, replikasi, penggantian, atau penghapusan data dan modus operandi pemalsuan paspor lainnya. ■

Pengambilan foto paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan (Foto: Tommy Ariyanto)



IMIGRASI ENTIKONG GAGALKAN PELARIAN SUBJEK CEGAH KEMENKEU

MS, pengusaha yang terlibat dalam skandal BLBI dan terdaftar sebagai subjek cegah, mencoba kabur ke Malaysia. Berkat integrasi sistem perlintasan imigrasi yang menjangkau hingga perbatasan dan pelosok negeri, petugas imigrasi berhasil menggagalkan pelarian MS.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Petugas imigrasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong mencegah keberangkatan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial MS (87) pada Minggu sore (8/9). Pada saat petugas konter melakukan pemindaian paspor, ia mendapati bahwa paspor MS identik 100% dengan subjek cegah. MS kemudian diarahkan untuk pemeriksaan lanjutan dan pendalaman dengan pejabat imigrasi yang berwenang. Dari pemeriksaan lanjutan dan pendalaman tersebut, dikonfirmasi bahwa MS termasuk dalam daftar cegah. Setiap orang yang merupakan subjek cegah dilarang meninggalkan Indonesia dalam kurun waktu tertentu hingga terbit keputusan pencabutannya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menjelaskan bahwa MS merupakan subjek yang masuk dalam daftar cegah yang masih sah dan berlaku. Ia didaftarkan ke subjek cegah atas permintaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban terhadap piutang negara.

Masuk DPO sejak 2006

MS merupakan pria kelahiran Medan, 17 Januari 1937 dan sempat mengenyam bangku kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara. MS sudah terjun ke bisnis tekstil sejak 1958. Pada 1960, MS hijrah ke Jakarta dan dua tahun berikutnya berbisnis di Pekalongan,

Di Pekalongan, pada 1962 MS mendirikan usaha pintal benang yang kelak menjadi Textile Manufacturing Company (Texmaco).

Pria berusia 87 tahun itu masuk daftar cegah Kemenkeu karena menjadi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menunggak pembayaran utang kepada negara. Utang MS mencapai Rp31,72 triliun dan 3,91 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau bila dijumlahkan setara dengan Rp95 triliun.

MS telah dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO) oleh Markas Besar Kepolisian RI sejak Juni 2006 lalu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menganggap MS adalah obligor yang tidak kooperatif sehingga kepolisian memandang perlu untuk memburu dan menangkap MS.

Dilansir dari berbagai sumber, MS berjaya pada masa Orde Baru dan merupakan pengusaha yang terlibat dalam skandal BLBI dengan utang mencapai Rp29 triliun dan 80,57 juta dolar AS. MS memimpin Grup Texmaco, yang masuk dalam daftar debitur prioritas Satgas BLBI. Sebelum krisis finansial pada 1997–1998, Texmaco memperoleh pinjaman dalam jumlah besar dari bank-bank yang kemudian mendapat bantuan keuangan dari pemerintah (*bailout*). Beberapa bank tersebut kemudian mengalami kredit macet hingga harus ditutup.

Pemerintah kemudian menyita 587 bidang tanah milik Texmaco di

Subang, Sukabumi, Pekalongan, Batu, dan Padang sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara. Total luas tanah yang disita pemerintah mencapai 4,7 juta meter persegi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Januari 2021 menyatakan penyitaan tersebut hanya sebagian dari upaya pemulihan aset terkait utang Texmaco.

Selain terlibat dalam kasus BLBI, MS juga sempat memiliki kasus dengan Bank BNI terkait kredit macet. Namanya sempat muncul dalam daftar orang terkaya di Indonesia sebelum krisis moneter melanda. Kedekatannya dengan Presiden Republik Indonesia saat itu memungkinkan MS memperoleh akses ke pinjaman besar dari bank-bank dan lembaga pemerintah. Namanya pun sempat masuk dalam dokumen yang dibocorkan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada 2013. Dari kredit macet sampai perusahaan cangkang, MS dikenal sebagai pengusaha tekstil

MS BERJAYA PADA MASA ORDE BARU DAN MERUPAKAN PENGUSAHA YANG TERLIBAT DALAM SKANDAL BLBI DENGAN UTANG MENCAIPI RP29 TRILIUN DAN 80,57 JUTA DOLAR AS.

dan garmen. Ia mengembangkan bisnisnya hingga ke industri alat berat dan mesin.

Petugas Imigrasi Gagalkan Pelarian MS

Berkat integrasi sistem perlintasan imigrasi yang menjangkau hingga perbatasan dan pelosok negeri, upaya MS untuk melarikan diri dari Indonesia pada hari penangkapannya berhasil digagalkan. Sistem ini tidak hanya efektif dalam mencegah individu yang dicekal meninggalkan negara, tetapi juga mampu mendeteksi keberadaan DPO Interpol.

"Kami menyerahkan MS ke

Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kemenkeu. PENCEKALAN yang bersangkutan berkaitan dengan urusan perdata dengan Kemenkeu melalui Satgas BLBI," ungkap Silmy Karim, Senin (9/9).

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Henry Dermawan Simatupang menjelaskan bahwa pada hari penangkapannya, MS bermaksud melarikan diri ke Kuching, Malaysia melalui PLBN Entikong. Saat tiba di PLBN, seorang petugas imigrasi yang sedang bertugas di Pos Rantai Keberangkatan (pos jalur mobil dan bus) melakukan pemeriksaan di kendaraan

MS. Setelah itu, petugas tersebut membawa MS ke konter keberangkatan untuk pemindaian dan pengecapan.

"Petugas PLBN Entikong melaporkan kejadian dan hasil pemeriksaan terhadap MS ke Kantor Imigrasi Entikong. Selanjutnya, kami menarik paspor MS," imbuh Henry. Selain dicegah ke luar negeri, paspor MS juga ditahan sebelum diserahkan kepada Satgas BLBI.

"Saya sangat mengapresiasi kinerja petugas imigrasi di PLBN Entikong yang menjaga profesionalitas dan integritasnya walaupun bertugas di garis terluar Republik Indonesia," ujar Dirjen Imigrasi. ■

Penangkapan MS, obligor BLBI (Foto: Dok. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat)





Desa Binaan: MEMBUKA CAKRAWALA KEIMIGRASIAN

Bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengintai para pekerja migran Indonesia (PMI). Sebagai upaya pencegahan, Ditjen Imigrasi mengadakan program Desa Binaan sebagai wadah sosialisasi dan edukasi.

■ Penulis: Irnadika Natasia

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Upah pekerja yang lebih besar di luar negeri dibandingkan dalam negeri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, di balik besarnya upah dan kesempatan bekerja di luar negeri, terdapat tindak kejahatan yang mengintai, seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sebenarnya, negara telah mengatur prosedur bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bekerja di luar negeri dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI), calon PMI harus memiliki kompetensi, sehat secara jasmani dan rohani, memiliki dokumen

yang lengkap, berusia minimal 18 tahun, serta terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Namun, ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur yang ada membuat mereka rentan menjadi PMI nonprosedural dan korban TPPO.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim dalam Pertemuan ke-27 Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Urusan Kekonsuleran se-Asia Tenggara (ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs/DGICM) di Nha Trang, Vietnam pada 14 Agustus 2024 menyatakan bahwa perlindungan pekerja migran dari bahaya TPPO harus menjadi perhatian utama, mengingat kontribusi mereka yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

dan inklusif di ASEAN. Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengadakan program Desa Binaan yang sudah berjalan sejak 2022 sebagai upaya mencegah TPPO dan PMI nonprosedural.

Desa Binaan dijalankan oleh satuan kerja kantor imigrasi sesuai dengan wilayah kerjanya. Kegiatan yang dilakukan Desa Binaan, antara lain, memberikan sosialisasi, bimbingan, dan layanan terkait proses bekerja di luar negeri secara legal. Dalam menyelenggarakan Desa Binaan, kantor imigrasi bekerja sama dengan perangkat desa setempat serta instansi terkait, seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Dinas Ketenagakerjaan.

"Kehadiran Imigrasi dalam bentuk Desa Binaan mendukung pembangunan manusia dan masyarakat untuk berkembang serta memperoleh kehidupan yang lebih baik," ujar Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo.

Desa Binaan juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang cara memperoleh paspor dengan benar serta mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan cara resmi. Melalui adanya Desa Binaan ini, WNI yang ingin bekerja di luar negeri diharapkan mau berperan aktif sebagai subjek yang mempersiapkan diri dan memilih pekerjaan dengan kesadaran penuh. "Kami harap program Desa Binaan dapat terlaksana secara merata di Indonesia, khususnya di daerah kantong-kantong pekerja migran. Dengan demikian, masyarakat dapat terpapar literasi keimigrasian yang maksimal," tutup Anom. ■



Risiko Kerja Tinggi, MEKANISME PENGGUNAAN SENJATA API PETUGAS IMIGRASI DIATUR

Pengawasan dan penindakan keimigrasian dinilai memiliki risiko kerja yang tinggi. Mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi diatur oleh pemerintah dengan mempertimbangkan fungsinya sebagai alat perlindungan diri.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah disahkan memuat peraturan baru terkait penggunaan senjata bagi petugas imigrasi di bidang penegakan hukum. Peraturan tersebut didasarkan pada tingginya risiko kerja petugas kala melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.

“Sudah terjadi peristiwa tragis ketika petugas imigrasi gugur saat menjalankan tugas. Pada April 2023, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Utara tewas ditikam orang asing yang ingin kabur dari ruang detensi. Orang asing ini terlibat terorisme dan kala itu ditangani oleh Densus 88 Antiteror bersama Imigrasi,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim pada Jumat (27/9).

Risiko kerja yang tinggi juga mengintai petugas imigrasi di daerah perbatasan negara, khususnya area rawan konflik. Petugas sering kali melakukan pengamanan terhadap pelaku kejahatan transnasional berbahaya sehingga penggunaan senjata api dinilai perlu untuk melindungi diri dan memastikan pelaku dapat ditangkap. Ancaman kekerasan, terorisme, dan kerusuhan yang mungkin dihadapi petugas membuat persenjataan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan diri, tetapi juga pemicu efek gentar bagi orang asing yang mencoba melawan petugas.

Pada 2024, kinerja Imigrasi dalam penegakan hukum dinilai makin baik. Penindakan keimigrasian pada Januari-September 2024 meningkat 124% atau

lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2023. Tercatat sebanyak 3.393 penindakan keimigrasian telah dilaksanakan oleh satuan kerja Imigrasi di seluruh Indonesia. Volume operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang lebih tinggi ini menimbulkan risiko yang lebih besar bagi petugas pelaksana penegakan hukum keimigrasian.

“Kita lihat referensi dari negara-negara lain yang penyelenggaraan fungsi keimigrasiannya sudah maju, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Malaysia. Petugas imigrasi di negara-negara ini diizinkan pakai senjata api, tentunya

dengan aturan yang sangat ketat,” lanjut Silmy.

Silmy menjelaskan, pemerintah sedang mengatur mekanisme penggunaan senjata api bagi petugas imigrasi melalui peraturan menteri. Langkah ini diambil setelah melewati tahap kajian dan uji publik yang komprehensif.

“Dengan adanya tanggung jawab baru ini, kami akan menentukan kriteria ketat bagi petugas yang berhak membawa senjata api serta prosedur penggunaan yang jelas, termasuk batasan-batasannya. Untuk sekarang belum kita terapkan karena masih menunggu aturan turunannya,” pungkas Silmy. ■

Petugas Imigrasi Ngurah Rai melaksanakan pengawasan. (Foto: Dok. Imigrasi Ngurah Rai)



ANAK USIA 6 TAHUN SUDAH BISA GUNAKAN AUTOGATE IMIGRASI

Direktorat Jenderal Imigrasi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan baru penggunaan *autogate* dikeluarkan. Perjalanan keluarga masuk Indonesia menjadi makin mudah, baik bagi WNI maupun WNA.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Per 26 Agustus 2024, anak berkewarganegaraan Indonesia atau asing dengan usia enam tahun atau lebih bisa melintas masuk dan keluar Indonesia menggunakan *autogate*. Hal ini diatur dalam kebijakan terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Sebelumnya, hanya anak berusia minimal 14 tahun yang bisa menggunakan perangkat *autogate* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Dampaknya adalah orang tua yang membawa anak di bawah 14 tahun, baik WNI maupun WNA, harus melewati pemeriksaan keimigrasian secara manual.

"Teknologi *face recognition* (pengenalan wajah) yang makin canggih memungkinkan deteksi wajah bahkan pada anak usia enam tahun. Dengan begitu, kami berharap penggunaan *autogate* dapat makin optimal dan memudahkan perjalanan, terutama bagi keluarga," jelas Direktur Jenderal

(Dirjen) Imigrasi Silmy Karim pada Jumat, (30/8).

Autogate adalah gerbang otomatis yang memungkinkan penumpang melewati pemeriksaan imigrasi dengan cepat dan mudah. Sistem ini menggabungkan teknologi pengenalan wajah dan manajemen perbatasan sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan tanpa perlu antre lama. Baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat dapat menggunakan fasilitas ini.

"Sampai saat ini, *autogate* yang sudah terpasang jumlahnya hampir mencapai 200. Perangkat *autogate* tersedia di tempat pemeriksaan imigrasi dengan lalu lintas yang tinggi, seperti Bandara Soekarno-Hatta dan [Bandara I Gusti] Ngurah Rai," jelas Silmy.

Teknologi pengenalan wajah dan manajemen perbatasan yang terintegrasi dalam sistem *autogate* telah menyederhanakan proses pemeriksaan imigrasi. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan pun menjadi lebih singkat, hanya 15-25 detik per penumpang. Penerapan teknologi ini mendukung ekosistem pelayanan keimigrasian yang lebih mulus (*seamless*), mulai dari pengajuan visa daring hingga pemeriksaan di bandara.

Dengan volume pelintas keluar masuk Indonesia yang mencapai 20.865.311 orang pada semester pertama 2024, Silmy Karim menegaskan pentingnya mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. "Kami coba studi banding *best practice* penggunaan *autogate* di negara lain. Di Singapura, misalnya, *autogate* sudah bisa dipakai untuk anak mulai usia enam tahun. Saya tantang tim untuk menerapkan ini juga di Indonesia. Memang tidak mudah, terutama dalam penyesuaian sistem dan sebagainya, tetapi alhamdulillah usaha kami membuahkan hasil," paparnya.

Penggunaan *autogate* untuk anak-anak dengan usia lebih muda diharapkan dapat memberi rasa nyaman bagi anak yang melintas keluar masuk Indonesia. "Kami ingin memberikan pengalaman perjalanan yang berkesan bagi seluruh penumpang, terutama anak-anak. Dengan *autogate*, proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan mudah. Anak-anak akan merasa lebih nyaman melalui proses imigrasi. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih baik," tutup Silmy. ■



Seorang anak berfoto dengan petugas Imigrasi setelah melewati *autogate* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Foto: Habil Ashari)

TERSEDIA

Paspor Elektronik di 11 Perwakilan RI di Luar Negeri



1.293 ORANG ASING DIPERIKSA DALAM OPERASI JAGRATARA, 185 DIPROSES HUKUM

Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan operasi nasional Jagratara tahap dua. Ribuan WNA diperiksa. Ratusan di antaranya terindikasi melakukan pelanggaran hukum keimigrasian.

■ Penulis: M. Fijar Sulistyio

Operasi pengawasan warga negara asing (WNA) berskala nasional Jagratara tahap dua digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada 22–23 Agustus 2024. Operasi ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan WNA terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

Selama dua hari pelaksanaan, petugas imigrasi memeriksa sebanyak 1.293 orang asing di 507 titik pengawasan di seluruh wilayah

Indonesia. Fokus utama pemeriksaan adalah aktivitas WNA yang berpotensi melanggar peraturan keimigrasian, seperti menyalahgunakan izin tinggal, bekerja tanpa izin, dan terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan kunjungan.

“Operasi Jagratara ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar M. Godam. Ia menambahkan,

Tim Operasi Jagratara memeriksa WN di wilayah Sorong, Papua Barat Daya. (Foto: Tommy Ariyanto)



Operasi Jagratara serentak dilakukan di Mataram oleh Tim Wasdakim. (Foto: I Ketut Adi Wardana)

“Kami akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam keimigrasian.”

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan 185 kasus yang perlu ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, 48 kasus di antaranya adalah dari warga negara (WN) Nigeria, 37 WN Tiongkok, 15 WN Pakistan, 15 WN India, dan sisanya dari WNA berbagai negara.

Dua pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah penyalahgunaan izin tinggal dan tinggal lajak (*overstay*). Petugas imigrasi Jakarta Selatan, misalnya, berhasil mengamankan satu WN India berinisial SS (48) yang tinggal lajak selama 6 tahun 5 bulan 7 hari atau 2.351 hari. Bahkan, petugas juga mendapati fakta bahwa SS sering mengganggu penghuni lain secara verbal dan membuat onar di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat pula sejumlah kasus WNA melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya.

“Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Tujuan kami adalah memberikan efek jera kepada para pelanggar dan menciptakan iklim yang kondusif bagi orang asing yang taat aturan,” tegas Godam.

Operasi Jagratara yang dilakukan secara rutin ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian serta mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara. Operasi ini juga berfungsi sebagai efek jera bagi WNA pelaku pelanggaran agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku. ■

Situs Web Ramah Disabilitas: **IMIGRASI HADIRKAN AKSESIBILITAS LEBIH BAIK**

Layanan publik digital Imigrasi makin inklusif bagi penyandang disabilitas. Situs web Ditjen Imigrasi telah mengimplementasikan empat prinsip utama yang dikenal dalam desain aksesibilitas.

■ Penulis: Adi Prasetyo

Situs web Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kini makin inklusif dengan hadirnya fitur ramah disabilitas, khususnya disabilitas visual. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan terjaminnya hak akses situs web Ditjen Imigrasi (<https://www.imigrasi.go.id/>) bagi penyandang disabilitas visual.

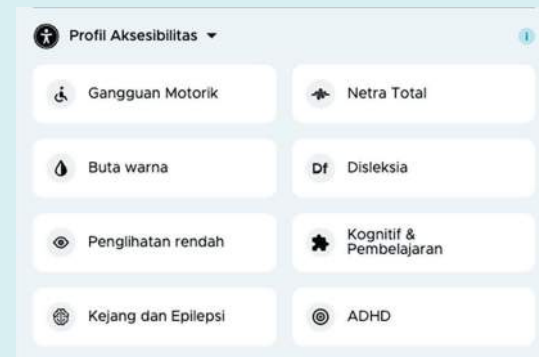
Inisiatif ini sejalan dengan *The Americans with Disabilities Act of 1990* (ADA) yang melindungi individu dengan disabilitas dari diskriminasi, dan berbanding lurus dengan Permenkumham No. 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Indonesia. Melalui regulasi ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan akses dan kualitas pelayanan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Fitur ramah disabilitas di situs web Ditjen Imigrasi telah mengimplementasikan empat prinsip utama yang dikenal dalam desain aksesibilitas: *perceivable*, *operable*, *understandable*, dan *robust* (POUR). Prinsip *perceivable* memastikan bahwa informasi dan elemen antarmuka (*interface*) dapat diterima oleh indra pengguna, seperti teks yang dapat diubah menjadi audio bagi penyandang disabilitas visual. *Operable* berarti situs tersebut dapat digunakan oleh semua pengguna, termasuk mereka yang menggunakan alat bantu seperti papan tombol atau pembaca layar. Prinsip *understandable* memastikan bahwa konten situs dapat dengan mudah dipahami bahkan oleh individu dengan gangguan kognitif. Terakhir, *robust* mengacu pada kompatibilitas dengan teknologi asistif yang terus berkembang sehingga situs tetap dapat diakses di masa depan.

Fitur-fitur yang diterapkan tidak hanya membantu penyandang disabilitas visual, tetapi juga mereka dengan gangguan disleksia, gangguan motorik, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau GPPH (*attention deficit hyperactivity disorder/ADHD*), dan berbagai gangguan kognitif lainnya. Misalnya, situs ini dilengkapi dengan mode kontras tinggi dan pembesaran teks untuk memudahkan pengguna yang memiliki gangguan penglihatan. Bagi pengguna dengan gangguan disleksia, *font* yang lebih ramah disleksia dapat diterapkan untuk membantu meningkatkan keterbacaan teks. Hal ini menciptakan lingkungan yang inklusif. Setiap pengguna, terlepas dari keterbatasan fisik atau kognitifnya, dapat mengakses layanan imigrasi dengan mudah.

Penerapan fitur-fitur ramah disabilitas ini menunjukkan langkah konkret Ditjen Imigrasi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif. Lebih dari sekadar pemenuhan

Situs web Ditjen Imigrasi. (Sumber: Situs Web Ditjen Imigrasi)



Profil aksesibilitas yang dapat digunakan (Sumber: Situs Web Ditjen Imigrasi)

regulasi, langkah ini merupakan bukti komitmen untuk memberikan pengalaman digital yang setara bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah melalui berbagai instansinya mulai menyadari pentingnya menciptakan layanan digital yang inklusif. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerapkan fitur serupa dalam situs web mereka. Hal tersebut tentunya untuk memastikan bahwa layanan mereka dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. ■

Kerja Sama Otoritas Indonesia dan Filipina: **TIGA BURON PEMERINTAH FILIPINA DITANGKAP, SATU MASIH DIBURU**

Tiga dari empat buron pemerintah Filipina telah ditangkap di Indonesia. Penangkapan SG, KO, dan AG merupakan hasil kerja sama antara Ditjen Imigrasi, Interpol Indonesia, Kepolisian RI, Biro Investigasi Nasional Filipina, dan Biro Imigrasi Filipina.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri, Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi men deportasi warga negara asing (WNA) pelanggar keimigrasian dan subjek perhatian khusus pemerintah Filipina berinisial AG pada Kamis (5/9). Wanita berusia 34 tahun ini diduga melakukan sejumlah tindak kriminal di negara asalnya, antara lain, tindak

pidana perdagangan orang (TPPO) dan pencucian uang.

AG berhasil diamankan Interpol Indonesia pada Selasa (3/9) pukul 23.58 WIB di Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) Saffar M. Godam menyampaikan, Direktorat Wasdakim Ditjen Imigrasi

mendeportasi AG pada Kamis (5/9) pukul 18.00 WIB setelah bekerja sama dengan Biro Investigasi Nasional dan Biro Imigrasi Filipina. Selanjutnya, AG akan menjalani proses hukum di negaranya.

"Kami menerima surat dari Biro Imigrasi Filipina pada 19 Agustus 2024. Surat ini menyangkut imbauan perhatian khusus kepada empat warga negara (WN) Filipina yang diduga terlibat tindak pidana keimigrasian berupa pemalsuan identitas pada dokumen perjalanan dan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan surat tersebut, Ditjen Imigrasi menerapkan cekal pada AG beserta rekan-rekannya,



Sosok AG, DPO WN Filipina, yang segera menjalani proses deportasi oleh Ditjen Imigrasi (Foto: Arif Rahman Suryaman)



DPO pemerintah Filipina yang telah ditangkap oleh petugas imigrasi di Batam Center (Foto: Dok. Kanim Batam)

yakni SG, WG, dan KO,” tutur Godam. Ia menambahkan, AG juga telah menjalani pemeriksaan oleh Kepolisian RI terkait dugaan tindak kriminal yang dilakukannya sebelum dideportasi.

Sebelumnya, SG (40) dan KO (24) yang juga masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pemerintah Filipina telah ditangkap oleh petugas Imigrasi di Batam Center, Kepulauan Riau pada Kamis (22/8). Mereka berhasil ditemukan melalui pemeriksaan dan penelusuran pada aplikasi Pelaporan Orang Asing. Petugas mendapati ZJ, seorang WN Singapura, melakukan pemesanan empat kamar di sebuah hotel di Batam Center selama tiga hari. Dari hasil pengecekan CCTV, ZJ adalah pihak yang membantu SG dan KO untuk reservasi hotel.

SG dan KO dibawa ke Direktorat Wasdakim Ditjen Imigrasi pada Rabu (21/8). Keesokan harinya, pada Kamis (22/8), kedua WNA tersebut dideportasi dengan dikawal oleh Biro Investigasi Nasional Filipina dan Biro Imigrasi Filipina.

Laporan dari Masyarakat

Berangkat dari laporan masyarakat pada Senin (19/8) mengenai dugaan tindak pidana keimigrasian, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam langsung bergerak. Tim melakukan pengawasan ketat di wilayah Batam

Center dan berhasil mengidentifikasi dua WNA yang dicurigai.

Setelah pengecekan lebih lanjut bersama Direktorat Wasdakim, diketahui bahwa kedua WNA tersebut merupakan WN Filipina yang masuk dalam DPO. Hal ini sesuai dengan surat permintaan pencarian dari Biro Imigrasi Filipina kepada Ditjen Imigrasi yang diterbitkan pada 19 Agustus 2024.

“Mereka (buron WN Filipina) kami temukan di Batam Center berdasarkan hasil pemeriksaan serta penelusuran melalui aplikasi Pelaporan Orang Asing. Petugas menemukan, ada orang bernama ZJ yang melakukan pemesanan empat kamar di HARRIS Hotel Batam Center selama tiga hari. Dari hasil pengecekan CCTV, diketahui bahwa ZJ adalah pihak yang membantu mereka untuk reservasi hotel,” jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Saffar M. Godam.

Setelah penangkapan, SG dan KO diamankan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, kemudian dijemput tim penyidik dari Direktorat Wasdakim pada Rabu (21/8). Mereka kemudian diserahkan dan dikawal oleh petugas imigrasi dari Biro Imigrasi Filipina pada Kamis (22/8). Dua minggu setelahnya, AG diamankan Interpol Indonesia di Tangerang, Banten untuk kemudian dideportasi.

AG sempat menduduki jabatan terhormat sebagai Wali Kota Baman di Provinsi Tarlac, Filipina.

la memenangkan pemilu kota kecil di Pulau Luzon pada 2022 dengan mengantongi 42,98% suara. Sebagai pejabat publik, citra AG yang melekat adalah pribadi yang ramah dan murah senyum.

Sejak Agustus 2024, AG diberhentikan dari jabatannya. Pada akhir bulan yang sama, Presidential Anti-Organized Crime Task Force dari Biro Investigasi Nasional Filipina serta Dewan Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering Council/AMLC) Filipina menuntutnya bersama 35 orang lain dengan 87 kasus pencucian uang di Departemen Kehakiman Filipina. Mereka dituduh telah mencuci lebih dari 100 juta peso (sekitar Rp27,7 miliar) dari hasil kegiatan kriminal.

AMLC juga membidik aset AD dan komplotannya yang setara 6 miliar peso (sekitar Rp1,68 triliun). Aset miliknya terdiri atas properti di Tarlac, Pampanga, dan Las Piñas City; kendaraan mewah, berbagai akun bank, hingga helikopter yang diduga untuk tindakan kriminal.

“Penangkapan [SG, KO, dan AG] ini merupakan langkah konkret pengamanan kawasan ASEAN dari kejahatan transnasional. Ini merupakan buah dari pertemuan Dirjen Imigrasi se-ASEAN di forum DGICM beberapa minggu lalu. Hingga hari ini kami masih memburu WG, anggota komplotan yang tersisa, bersama Kepolisian RI. Otoritas Indonesia dan Filipina terus berkoordinasi untuk segera menangkap buronan tersebut,” tutup Godam. ■

Serah terima AG dari Kepolisian Republik Indonesia ke Direktorat Jenderal Imigrasi (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Digitalisasi Layanan Keimigrasian: DITJEN IMIGRASI BEKERJA SAMA DENGAN VFS GLOBAL

Kerja sama antara Ditjen Imigrasi dan VFS Global diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi warga negara asing dalam proses permohonan visa Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan luas VFS Global, kedua belah pihak bertujuan untuk menarik lebih banyak pelancong asing.

■ Penulis: Shinta Puruhita

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meresmikan kerja sama dengan VFS Global, perusahaan terbesar di bidang layanan keimigrasian pada Rabu (16/10). Layanan keimigrasian pada situs web VFS Global akan mulai beroperasi pada Desember 2024, tepat sebelum musim liburan akhir tahun. Selain pelayanan keimigrasian, kedua belah pihak juga bekerja sama dalam meningkatkan minat warga negara asing (WNA) untuk mengunjungi Indonesia melalui berbagai program promosi.

Untuk memudahkan akses orang asing dalam mendapatkan visa, Ditjen Imigrasi telah menerapkan layanan berbasis daring. Kini, melalui kerja sama dengan VFS Global, Ditjen Imigrasi selangkah lebih maju dalam efisiensi proses permohonan dan penerbitan visa elektronik (e-visa). Afiliasi VFS Global dengan maskapai penerbangan internasional seperti Emirates, Thai Airways, dan Air India

juga mendukung penyebaran informasi dan promosi visa Indonesia.

"Jejaring kerja sama VFS Global dengan *airlines* (maskapai penerbangan) memungkinkan WNA untuk membeli tiket pesawat sekaligus memperoleh visa, misalnya pada platform milik maskapai Emirates. Saya berharap kerja sama serupa dapat terjalin dengan Garuda Indonesia untuk makin mempermudah proses perjalanan ke Indonesia," tutur Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim.

Silmy menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah menerapkan digitalisasi visa elektronik yang bisa diajukan secara daring dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Visa elektronik juga dapat digunakan untuk melewati *autogate*. "Sekarang, kami tingkatkan lagi jangkauan layanan dengan membuka akses permohonan melalui VFS Global," ujar Silmy.

Mendukung pernyataan tersebut, pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) VFS Global Zubin Karkaria



Door stop Dirjen Imigrasi bersama Dewan Direksi untuk memberi pernyataan terkait perjanjian kerja sama antara aDitjen Imigrasi dan VFS Global (Foto: Dimas Zainuddin Sukmajatnika)

mengatakan pihaknya sangat gembira dapat turut menyediakan layanan visa elektronik Indonesia.

"Indonesia merupakan destinasi yang sangat populer bagi para pelancong di seluruh dunia. Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk [menghadirkan] layanan daring ini. Opsi baru pengajuan visa melalui situs web VFS Global akan meningkatkan pengalaman pengajuan visa sehingga dapat mendorong penggunaan platform digital," ujar Zubin.

Melalui kerja sama ini, Ditjen Imigrasi memperoleh nilai tambah lain, yaitu fasilitas pemesanan grup besar dan layanan pelanggan dalam beberapa bahasa. Di samping itu, VFS Global juga memiliki jaringan di 153 negara dengan 3.469 kantor cabang di seluruh dunia.

"Ditjen Imigrasi menawarkan solusi digital termutakhir yang meningkatkan *experience* bagi WNA yang ingin mengunjungi Indonesia. Dalam kerja sama dengan VFS Global, kami bertujuan memberikan kontribusi secara efektif terhadap peningkatan kedatangan orang asing, dengan mempertimbangkan jaringan dan platform digital yang dimiliki oleh *partner* kami," pungkas Silmy. ■

Perjanjian kerja sama antara Ditjen Imigrasi dan VFS Global untuk mempermudah pengajuan visa (Foto: Dimas Zainuddin Sukmajatnika)



Kuartal III Baru Mulai, IMIGRASI CAPAI TARGET Rp6 TRILIUN PNBP LEBIH AWAL

Keberhasilan Ditjen Imigrasi dalam mencapai target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang ditetapkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kinerja sektor keimigrasian. Dengan implementasi paspor elektronik yang makin meluas, potensi pertumbuhan penerimaan negara dari sektor ini tampak makin cerah.

■ Penulis: M. Fijar Sulistyó

Target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp6 triliun telah berhasil dibukukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada awal kuartal III tahun 2024, Sabtu (7/9). Target ini dicapai lebih awal dari yang direncanakan. Persentase kenaikan PNBP yang cukup signifikan berasal dari sektor paspor (164,55%), disusul izin tinggal (135,56%), kemudian sektor keimigrasian lainnya (125,38%).

"Kami ditargetkan PNBP tahun 2024 sekitar Rp6 triliun, hampir tiga kali lipat target tahun lalu yang hanya Rp2,3 triliun. Alhamdulillah, sudah tercapai di awal September ini," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim pada Senin (9/9).

Sebelumnya pada 2023, Ditjen Imigrasi menyelor Rp7,3 triliun penerimaan negara dari sektor nonpajak. Jumlah ini tercatat sebagai rekor PNBP tertinggi sepanjang sejarah Imigrasi Indonesia.

PNBP Imigrasi terbesar sebelumnya dicapai pada 2022 dengan jumlah Rp4,5 triliun, yang disusul tahun 2014 sebesar Rp2,9 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp2,6 triliun. Pada 2023, jumlah kontribusi PNBP meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 169% dibandingkan dengan 2022.

"Persentase capaian PNBP paspor per 7 September ini 164,55%. Dari target penerimaan sekitar Rp940 miliar, alhamdulillah kita bisa capai Rp1,5 triliun," terang Silmy.

Silmy juga menjelaskan bahwa kenaikan PNBP paspor secara



signifikan salah satunya dipengaruhi oleh implementasi paspor elektronik, baik di dalam maupun luar negeri. Per April 2024, 126 kantor imigrasi di seluruh Indonesia bisa melayani penerbitan paspor elektronik. Selain itu, 11 dari 22 perwakilan RI sudah mengimplementasi penerbitan paspor elektronik, di antaranya KBRI Singapura, KBRI Tokyo (Jepang), KBRI Seoul (Korea Selatan), KBRI Den Haag (Belanda), KBRI Berlin (Jerman), KBRI Beijing (Tiongkok), KJRI Jeddah (Arab

Saudi), KJRI Los Angeles (Amerika Serikat), KJRI Sydney (Australia), KJRI Songkhla (Thailand), dan KJRI Frankfurt (Jerman).

"Saya targetkan di bulan September 2024, 22 perwakilan RI yang memiliki atase imigrasi sudah bisa melayani paspor elektronik," ujar Silmy. Lebih lanjut, Silmy berharap, "Melihat prognosis yang baik ini, saya optimistis tahun ini bisa kita tutup dengan PNBP yang lebih baik dari tahun sebelumnya." ■

IMIGRASI TERTIBKAN PENYALAHGUNAAN VISA DAN ITAS INVESTOR

Direktorat Jenderal Imigrasi mengubah syarat penanaman modal menjadi Rp15 miliar untuk izin tinggal tetap penanam modal. Perubahan ini dalam rangka memperketat WNA yang bisa menerima visa investor.

■ Penulis: Immas Sari Wijaya



Dirjen Imigrasi Silmy Karim menjelaskan tentang penyalahgunaan visa dan ITAS investor (Foto: Arif Rahman Suryaman)

Seorang wanita warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial AA (32) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, pada Jumat (6/9) akibat penyalahgunaan izin tinggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, AA yang merupakan pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) investor diduga terlibat dalam prostitusi. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menyampaikan, AA masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan pada Desember 2020, kemudian melakukan perpanjangan ITAS investor. Saat itu, syarat penyertaan modal untuk diberikan ITAS investor senilai Rp1 miliar.

"Sebelum pemberlakuan Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, penerbitan ITAS untuk investor dapat diproses dengan syarat penyertaan

modal yang terbilang rendah, yakni Rp1 miliar. Maka, pada saat saya menjabat, ketentuan modal pada aturan terbaru diubah, menjadi Rp10 miliar untuk izin tinggal terbatas dalam rangka penanaman modal, dan Rp15 miliar untuk izin tinggal tetap (ITAP) penanam modal. [Perubahan aturan] ini dalam rangka memperketat WNA yang bisa menerima visa investor. Kami makin selektif," jelas Silmy Karim.

Perubahan kebijakan keimigrasian terkait nilai penyertaan modal bagi pemohon visa investor tersebut merespons Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi juga gencar menertibkan pemegang visa investor agar tidak menyalahgunakannya.

Imigrasi pun rutin melaksanakan operasi pengawasan orang asing di seluruh Indonesia, khususnya Bali, guna menjangkau orang asing yang beraktivitas tidak sesuai izin tinggal.

"Pada Juni lalu, Ditjen Imigrasi menindak 103 orang asing asal Taiwan pelaku kejahatan siber. Sebagian dari mereka menggunakan visa investor," tambah Silmy.

Silmy menjelaskan, secara prosedural, penerbitan visa dapat dilakukan apabila hasil verifikasi persyaratan telah dipenuhi pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi juga dilakukan dengan pengecekan catatan pencegahan dan penangkalan (cekal).

"Dalam proses tersebut, jika syarat sudah dipenuhi pemohon dan yang bersangkutan tidak memiliki *track record* yang patut diwaspadai, visanya bisa diterbitkan. Akan tetapi, selama perjalanannya saat berada di Indonesia, tidak semua orang asing memiliki integritas untuk mematuhi peraturan. Contohnya macam-macam, mulai dari berkendara ugal-ugalan sampai beraktivitas tidak sesuai izin tinggal," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, penegakan hukum juga dilakukan terhadap tiga perempuan WNA, dua orang warga negara (WN) Uganda berinisial RKN dan FN, serta satu WN Rusia berinisial IT. Mereka ditangkap oleh petugas imigrasi karena terlibat prostitusi di Bali.

"Imigrasi merupakan instansi yang menjalankan dua fungsi, yakni pelayanan dan penegakan hukum. Sebagaimana kami terus melakukan peningkatan (*improvement*) dalam pelayanan, kami juga memperkuat pengawasan keimigrasian. Akselerasi pelayanan dan penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan pada sistem dan infrastruktur, tetapi juga sampai level kebijakan. Evaluasi tentunya kami lakukan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan kualitas orang asing yang memasuki Indonesia," pungkas Dirjen Imigrasi. ■

Trade Expo Indonesia 2024: TARIK INVESTOR ASING BERKUALITAS DENGAN GOLDEN VISA

Trade Expo Indonesia 2024 menjadi ajang bagi Ditjen Imigrasi untuk mempromosikan program baru. Acara ini diikuti oleh berbagai pelaku usaha dan institusi pemerintah untuk memperkenalkan produk, layanan, serta kebijakan strategis. Ditjen Imigrasi mengangkat program *golden visa* untuk menarik investor asing berkualitas.

■ Penulis: Jimmy Asmoro

Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 yang digelar pada Rabu (9/10) hingga Sabtu (12/10) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD menjadi ajang penting untuk mempromosikan potensi ekonomi dan bisnis Indonesia kepada dunia internasional.

Diikuti oleh berbagai pelaku usaha dan institusi pemerintah, acara ini menghadirkan kesempatan bagi berbagai sektor untuk memperkenalkan produk, layanan, serta kebijakan strategis yang berperan dalam memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

Acara TEI 2024 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menekankan

pentingnya pameran ini sebagai salah satu motor penggerak peningkatan ekspor dan investasi. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong iklim bisnis yang kompetitif dan ramah bagi investor asing.

Salah satu partisipan utama TEI 2024 adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Ditjen Imigrasi memanfaatkan pameran ini untuk menyosialisasikan program unggulan terbaru, yaitu *golden visa*. *Golden visa* merupakan program yang memberikan hak tinggal jangka panjang bagi investor asing, pengusaha, serta profesional internasional yang memenuhi kriteria tertentu.

Program ini dirancang untuk memfasilitasi masuknya modal dan bakat dari luar negeri yang diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi, inovasi, serta daya saing global Indonesia.

Selama pameran, Ditjen Imigrasi memberikan informasi terperinci mengenai prosedur pengajuan *golden visa*, persyaratan yang harus dipenuhi, serta manfaat yang bisa didapatkan oleh para pemegang visa ini. Beberapa kategori *golden visa* yang dipromosikan meliputi visa untuk investor asing dengan nilai investasi tertentu, pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan di Indonesia, serta para profesional di bidang teknologi, seni, dan riset.

Pengenalan *golden visa* di ajang internasional seperti TEI 2024 ini merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat citra negara sebagai destinasi investasi yang ramah dan terbuka. Dengan adanya *golden visa*, diharapkan akan makin banyak investor asing berkualitas yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia dan membawa dampak positif bagi perekonomian, lapangan kerja, serta kemajuan sektor-sektor prioritas seperti teknologi, infrastruktur, dan pariwisata.

TEI 2024 juga dihadiri oleh Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Agato P.P. Simamora yang melihat langsung bagaimana antusiasme peserta pameran terhadap informasi yang diberikan oleh petugas tentang *golden visa* Indonesia.

"Program *golden visa* ini adalah langkah nyata pemerintah Indonesia untuk memudahkan investor dan profesional global untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi negara kami. Dengan visa jangka panjang ini, kami memberikan akses yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar bagi mereka yang ingin berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Kami berharap program ini menjadi jembatan antara talenta global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan inovatif," ucap Simamora.

TEI 2024 tidak hanya menjadi pameran dagang, tetapi juga ajang penting untuk memperkenalkan kebijakan-kebijakan strategis seperti *golden visa* yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. ■

Petugas imigrasi memberikan hadiah kepada salah seorang pengunjung yang berkonsultasi di stan *golden visa* (Foto: Jimmy Asmoro)



Ratusan WNA Dideportasi, **RIBUAN MASUK DAFTAR CEKAL DITJEN IMIGRASI**

Keimigrasian Indonesia berkomitmen menjaga keamanan negara. Tindakan tegas terhadap orang asing yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah masuknya unsur-unsur yang tidak diinginkan.

■ Penulis: Roro Aditya Citranigtyas Ningrum

Ikut Demonstrasi, Dua WN Inggris Dideportasi



Dua WN Inggris yang dideportasi karena ikut orasi demo ojek daring (Foto: Ditjen Imigrasi)

Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Pusat mendeportasi dua warga negara (WN) Inggris, Benjamin James Lovell dan Benjamin Thomas Sloan, pada Rabu (4/9) melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keduanya melanggar Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena melakukan orasi pada demonstrasi ojek daring di Jakarta, Sabtu (29/8).

“Mereka terpantau melakukan orasi di tengah demonstrasi pengemudi ojek dan kurir *online* di sekitar Patung

Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu lalu. Saya perintahkan tim untuk bergerak dan mengamankan [mereka]. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor dan kami periksa,” ungkap Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Pusat.

Terkait hal ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menegaskan bahwa area demonstrasi merupakan wilayah yang dilarang bagi orang asing. “Pada dasarnya mereka tamu di Indonesia. Visa mereka untuk berlibur, tetapi mereka malah

ikut orasi. Ini jelas ada pelanggaran terhadap aturan keimigrasian,” sambung Silmy.

Atas pelanggaran tersebut, petugas imigrasi memberikan tindakan berupa deportasi dan pencekalan terhadap Lovell dan Sloan. Kedua WNA tersebut sempat ditahan selama 6 hari sebelum diterbangkan ke negara asal dengan biaya mandiri. Silmy pun mengimbau kepada WNA untuk selalu menaati aturan serta menghormati adat dan budaya setempat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. ■

Kuartal III Tahun 2024: 378 WNA Dideportasi dari Bali

Per 9 September 2024, jajaran Imigrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali mendeportasi 378 warga negara asing (WNA). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan 335 orang asing pada 2023. Mereka dideportasi oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai, Kanim Denpasar, Kanim Singaraja, dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Dalam periode tersebut, Rudenim Denpasar menjadi unit pelaksana teknis imigrasi yang mencatatkan deportasi terbanyak, yaitu sejumlah 203 orang.

Deportasi merupakan penindakan keimigrasian yang paling banyak

diberikan kepada orang asing. Secara nasional, deportasi menempati porsi 73,64% dari keseluruhan jumlah tindakan administratif keimigrasian (TAK) dalam enam bulan pertama 2024. Tercatat 1.503 orang asing dideportasi dari Indonesia. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 135,21% dibanding semester satu 2023 yang sebanyak 639 orang.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka,” jelas Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Selasa (10/9).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melakukan operasi



Konferensi pers Kantor Imigrasi Ngurah Rai
(Foto: Kanim Ngurah Rai)

pengawasan skala nasional Jagrata yang menjangkau 914 orang asing pada Mei lalu dan 1.293 orang asing pada Juli. Di Bali sendiri, operasi pengawasan Bali Becik yang dilakukan pada Juni 2024 berhasil menjangkau 103 orang asing yang diduga merupakan sindikat kejahatan siber internasional. ■

7.614 Orang Masuk Daftar Cekal Ditjen Imigrasi

Sementara itu, hingga 22 September 2024 tercatat sebanyak 7.614 orang masuk daftar pencegahan dan penangkalan (cekal) Ditjen Imigrasi. Dari total tersebut, 602 merupakan pencegahan sementara dan 7.012 merupakan penangkalan (penolakan masuk orang asing ke Indonesia).

Secara terperinci, sebanyak 1.644 orang asing (23,5%) yang ditangkal masuk dalam daftar tangkal untuk pertama kali dan 76,5% di antaranya telah diperpanjang masa penangkalannya. Sementara itu, 518 orang yang masuk daftar pencegahan merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang sedang menjalani proses

hukum dan 84 lainnya orang asing yang belum menuntaskan kewajibannya di Indonesia.

“Petugas imigrasi berhak menunda orang asing keluar wilayah Indonesia dalam hal mereka masih punya kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan, misalnya sangkutan pajak dan sebagainya,” jelas Silmy Karim.

Silmy juga menjelaskan bahwa dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing bisa ditolak untuk masuk ke Indonesia maksimal selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Sebelumnya, jangka

waktu penangkalan sama seperti pencegahan, yakni 6 bulan.

“Namun, perpanjangan penangkalan juga tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan orang asing. Dalam penjelasan Pasal 102 ayat (3) UU Keimigrasian disebutkan bahwa penangkalan seumur hidup dapat diterapkan apabila Indonesia dan negara asal orang asing menganggap perbuatan yang bersangkutan sebagai tindak pidana. Contohnya yang paling berat, antara lain, peredaran narkotika dan terorisme,” sambung Silmy.

Peningkatan jumlah penangkalan sebanyak 7.012 orang tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan negara, terutama dari ancaman kejahatan transnasional, seperti penyalahgunaan dan peredaran narkoba, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta ancaman masuknya pelaku kejahatan seksual.

“Ini cerminan komitmen kami dalam menjaga keamanan negara. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap orang asing yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah masuknya unsur-unsur yang tidak diinginkan,” tutup Silmy. ■

Pemeriksaan orang asing oleh petugas imigrasi di Bali (Foto: Imigrasi)



Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Mulyana menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penguatan dan Sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian/Lembaga, Selasa (3/9) di hotel Le Méridien Jakarta. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PPNS dalam menjalankan tugasnya.

“PPNS merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PPNS, khususnya di lingkungan Imigrasi, dalam menangani berbagai kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian,” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas yang memberikan sambutan dalam kesempatan tersebut.

Sejak awal 2024 sampai dengan periode Agustus, terdapat 90 warga negara asing (WNA) yang menjalani proses *pro justitia*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 orang dalam tahap penyidikan, 32 orang dalam tahap berkas perkara lengkap (P21), dan 23 orang dalam tahap putusan. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah sepanjang tahun 2023, yakni sebanyak 58 *pro justitia*. Silmy menyebut, jumlah *pro justitia* yang ditangani PPNS Imigrasi dapat terus meningkat setelah kerja sama dengan Kejaksaan Agung terlaksana.

PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS bertanggung jawab memastikan penyidikan dilakukan secara profesional dan adil, serta memastikan hak-hak tersangka dan korban dihormati selama proses penyidikan. Oleh karena itu, PPNS harus memenuhi persyaratan dan standar yang ketat dalam melaksanakan tugasnya. Syarat dan standar tersebut seperti memiliki keahlian dan keterampilan dalam penyidikan, serta menjaga integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya.

Saat ini, jumlah PPNS Imigrasi mencapai 240 orang dari seluruh kantor imigrasi, divisi, bidang, dan rumah detensi imigrasi. Di dunia keimigrasian, PPNS merupakan wujud pelaksanaan

Kerja Sama Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung:

TINGKATKAN KOMPETENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Di dunia keimigrasian, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS merupakan wujud pelaksanaan fungsi Imigrasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Guna meningkatkan kompetensi PPNS, Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung jalin kerja sama.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara



Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung di Le Méridien Jakarta (Foto: Arif Rahman Suryaman)

fungsi Imigrasi dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Mereka turut menjamin izin masuk dan izin tinggal orang asing yang berada di Indonesia sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Senada dengan Menkumham, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum dalam memberantas tindak pidana. “Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen

kita bersama untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan,” tegas Burhanuddin.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan PPNS dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien serta memiliki standar kompetensi yang tinggi. Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. ■

Kompas Travel Fair 2024:

LAYANAN PEMBUATAN PASPOR HADIR KEMBALI

Dengan antusiasme yang tinggi dari tahun sebelumnya, Ditjen Imigrasi kembali membuka layanan pembuatan paspor di Kompas Travel Fair 2024. Layanan ini mempermudah masyarakat dalam pembuatan paspor, terutama bagi mereka yang hanya sempat datang di akhir pekan.

■ Penulis: Mayza Fairda

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Jakarta Utara membuka kembali layanan pembuatan paspor di pameran Kompas Travel Fair (KTF) 2024. KTF 2024 digelar pada Jumat (20/9), tetapi durasi pembukaan kuota pembuatan paspor untuk pameran ini berlangsung hingga Minggu (22/9) atau sampai dengan hari terakhir pameran.

Tahun sebelumnya, Ditjen Imigrasi juga membuka layanan pembuatan paspor di KTF 2023 dan mendapatkan antusiasme yang sama. Kuota permohonan paspor habis dalam waktu lima hari sejak dibuka.

Dengan antusiasme yang cukup tinggi, Ditjen Imigrasi kembali membuka stan di KTF 2024 untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan paspor pada Sabtu dan Minggu tanpa harus pergi ke kantor imigrasi. Permohonan pembukaan kuota pembuatan paspor dapat dilakukan melalui aplikasi M-Paspor sejak dua minggu sebelum acara KTF 2024 mulai.

Kuota permohonan paspor yang diberikan di KTF 2024 sebanyak 300 permohonan paspor elektronik (e-paspor) dalam waktu tiga hari. Kuota tersebut sudah habis sebelum acara Kompas Travel Fair berlangsung.



Layanan pembuatan paspor di Kompas Travel Fair 2024 (Foto: Mayza Fairda)

Pada saat hari kedatangan untuk membuat paspor, pemohon wajib membawa KTP, kartu keluarga, dan dokumen identitas berupa akta kelahiran; ijazah SD, SMP, dan SMA; atau buku nikah. Permohonan paspor di KTF 2024 hanya berlaku untuk pembuatan paspor baru atau penggantian, tidak melayani paspor rusak, hilang, atau pengubahan data. Paspor dapat diambil pada empat hari kerja setelah pengambilan foto dan wawancara. Pemohon juga dapat memilih pengantaran paspor via PT Pos Indonesia.

Selain membuka pelayanan paspor, stan Ditjen Imigrasi juga membuka pelayanan informasi untuk masyarakat yang datang dan memiliki pertanyaan seputar keimigrasian. Masyarakat yang hadir juga dapat melakukan undian untuk mendapatkan cendera mata menarik yang telah disediakan.

Di sela-sela pameran, Ketua Tim Humas Ditjenim Achmad Nur Saleh juga memberikan penyuluhan informasi berupa gelar wicara perihal pengajuan paspor. Para pemohon paspor memberikan respons yang positif dan tanggapan yang baik terkait pelayanan paspor di KTF 2024 ini. "Sangat membantu untuk saya yang hanya memiliki waktu selain hari kerja. Prosesnya cepat walaupun harus antre sedikit," ujar salah satu pemohon paspor. ■

Suasana Kompas Travel Fair 2024 (Foto: Mayza Fairda)



Efisien dan Responsif, **PEMBUATAN PASPOR BISA DILAKUKAN DI 3 MAL INI**

Sebagai wujud pelayanan yang efisien dan responsif, Direktorat Jenderal Imigrasi membuka layanan Immigration Lounge. Dalam layanan ini, pembuatan paspor selesai hanya dalam waktu satu jam dan langsung dapat diambil.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Immigration Lounge hadir di Mall Taman Angrek (MTA), Jakarta. Setelah peresmian Immigration Lounge Pondok Indah Mall (PIM) 3 di bulan Juni dan Senayan City di bulan September lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim meresmikan Immigration Lounge MTA yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Senin (8/10). Bertempat di *ground floor* (GF) unit F15, Immigration Lounge MTA merupakan pelayanan khusus pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan *visa on arrival* (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien. Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil.

"Layanan keimigrasian yang diberikan di Immigration Lounge ini khusus untuk percepatan paspor

elektronik bagi WNI (warga negara Indonesia) dan perpanjangan VoA bagi WNA dengan kuota percobaan masing-masing 50 orang untuk paspor dan 30 orang untuk VoA per hari. Jadi, layanannya lebih spesifik," jelas Silmy.

Masyarakat yang akan mengurus paspor di Immigration Lounge pada hari Senin sampai dengan Jumat harus mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Bagi yang lebih memilih datang langsung, layanan *walk-in* hanya tersedia pada Sabtu dan Minggu. Sementara itu, WNA yang akan mengurus perpanjangan VoA harus mendaftar terlebih dahulu melalui immilounge.com/wna/.

Dalam hal karakteristik, layanan Immigration Lounge MTA memiliki kesamaan dengan Immigration Lounge PIM 3, yaitu melayani paspor elektronik percepatan serta perpanjangan VoA. Sementara itu, Immigration Lounge Senayan City yang bertempat di lantai



Pelayanan pembuatan paspor di Immigration Lounge Pondok Indah Mall 3 (Foto: Arif Rahman Suryaman)

6 Mall Senayan City, yang merupakan unit layanan di bawah Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, hanya melayani permohonan paspor baru dan penggantian paspor habis masa berlaku.

Pemohon yang berminat mengurus paspor di Immigration Lounge Senayan City juga harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor. Kuota dibuka setiap hari untuk 50 pemohon per hari. Layanan Immigration Lounge Senayan City beroperasi pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB pada hari Senin s.d. Jumat, serta pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB di akhir pekan.

Sementara itu, Immigration Lounge di PIM 3 hadir pada hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 10.00 WIB s.d. 18.00 WIB. Pada Sabtu dan Minggu, jam pelayanan mulai pukul 10.00 s.d. 14.00 WIB.

Immigration Lounge tidak hanya menjadi wujud fisik sebuah layanan keimigrasian, tetapi juga pengejawantahan tekad dari semangat pelayanan yang lebih baik, efisien, responsif, dan inovatif guna meningkatkan kepuasan layanan bagi masyarakat.

Silmy menambahkan, "Saya sangat mengapresiasi inovasi ini karena merespons kebutuhan pengguna layanan dengan baik. Imigrasi akan terus memperluas layanan, mendekatkan diri kepada masyarakat, dan selalu hadir untuk menjawab keinginan masyarakat."

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Immigration Lounge dapat menghubungi layanan pelanggan (*customer service*) Kantor Imigrasi Jakarta Barat melalui telepon di 0811-9273-003 atau Instagram @imigrasi_jakbar; layanan pelanggan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat melalui WhatsApp di 0811-8418-333 atau Instagram @kanimjakpus.; dan layanan pelanggan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan di nomor 08111616423 atau Instagram @kanimjaksel. ■



Trade Expo Amazing Indonesia in Jeddah: IMIGRASI SASAR ELITE DUNIA BERKUALITAS

Ekshibisi Trade Expo Amazing Indonesia in Jeddah promosikan perdagangan dan pariwisata Indonesia. *Golden visa* menjadi tumpuan untuk menarik investasi berkualitas ke Indonesia.

Petugas imigrasi sedang menjelaskan *golden visa* kepada pengunjung stan Golden Visa Indonesia. (Foto: Dimas Zainuddin Sukmajatnika)



■ Penulis: Riski Amalia

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi sasar elite dunia berkualitas untuk datang ke Indonesia melalui sosialisasi dan promosi kebijakan keimigrasian terbaru *golden visa* dalam Trade Expo Amazing Indonesia in Jeddah pada Kamis (26/9) sampai dengan Sabtu (28/9) di Hotel Al Mutlaq, Jeddah, Arab Saudi. Tercatat sejumlah 24 instansi berpartisipasi dalam acara tersebut yang meliputi lembaga pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), unsur swasta, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Indonesia.

Ekshibisi dibuka langsung oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron Ambary. "Kami mengundang Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berpartisipasi dan mempromosikan *golden visa*. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia menjadi salah satu negara destinasi favorit warga negara Arab Saudi. Banyak sekali pelaku bisnis [Arab] Saudi yang datang ke Indonesia. Karena itu, *golden visa* bisa menjadi daya tarik bagi mereka untuk datang ke Indonesia," papar Yusron.

Dalam acara tersebut, sejumlah warga negara asing (WNA) yang

mengunjungi stan Golden Visa Indonesia milik Ditjen Imigrasi menunjukkan ketertarikannya terhadap *golden visa* Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Asim Garoot. Asim adalah warga Arab Saudi keturunan Garut, Jawa Barat, yang kini menempuh karier sebagai konsultan hotel dan travel di Arab Saudi.

"Saya lihat animo terhadap *golden visa* Indonesia cukup tinggi. Ini menjadi indikasi bahwa masyarakat internasional melihat Indonesia sebagai destinasi yang menjanjikan, dan ini menjadi langkah awal yang baik untuk mendatangkan pelintas berkualitas ke Indonesia sebagaimana diharapkan oleh Presiden Jokowi," ujar Staf Teknis Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Midran Dylan yang turut hadir di stan Imigrasi.

Trade Expo Amazing Indonesia in Jeddah adalah serangkaian acara yang diselenggarakan oleh KJRI di Jeddah untuk mempromosikan perdagangan dan pariwisata Indonesia di Arab Saudi. Acara ini juga sebagai sarana menampilkan keragaman budaya Indonesia serta bagian dari agenda KJRI di Jeddah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79.

Salah satu pengunjung yang menghampiri stan *Golden Visa* Indonesia adalah Haloul. Haloul mengekspresikan kecintaannya terhadap Indonesia. "Anak saya kuliah di Jember. Saya beberapa kali dalam setahun ke Indonesia," ujarnya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menyampaikan bahwa sosialisasi *golden visa* dalam gelaran internasional Trade Expo Amazing Indonesia in Jeddah menjadi langkah pemerintah Indonesia untuk membuka pintu bagi pelintas berkualitas yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia.

Hari ketiga gelaran tersebut ditutup dengan catatan positif. Seorang investor asal Arab Saudi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan permohonan *golden visa* subtype *second home visa*.

"*Golden visa* Indonesia saat ini menjadi tumpuan harapan untuk menjadi katalisator perubahan yang signifikan bagi Indonesia, menarik investasi berkualitas, dan mempercepat pembangunan bangsa Indonesia," tutup Achmad. ■



Pematerian dari salah satu narasumber di kegiatan seminar "Menuju Pusat Literasi Keimigrasian di Indonesia" (Foto: I Ketut Adi Wardana)

Seminar dan Library Award 2024: **MENUJU PUSAT LITERASI KEIMIGRASIAN**

Untuk menuju pusat literasi keimigrasian di Indonesia, Perpustakaan Ditjen Imigrasi mengadakan seminar dan Library Award 2024. Seminar ini menjadi salah satu langkah strategis pengembangan Perpustakaan Ditjen Imigrasi dan bentuk apresiasi serta motivasi bagi seluruh pegawai.

■ Penulis: Febri Yuliana Putri

Perpustakaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengadakan seminar dengan tema "Menuju Pusat Literasi Keimigrasian di Indonesia" dan Library Award 2024 di The Sakala Resort Bali pada Kamis (11/9) s.d. Sabtu (14/9). Acara ini merupakan kegiatan tahunan yang diadakan oleh Tim Perpustakaan Ditjen Imigrasi sejak 2022.

Seminar ini dihadiri oleh hampir 300 peserta dan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali Pramela Yunidar Pasaribu. Pramela menyampaikan, "Seminar ini menjadi langkah strategis pengembangan Perpustakaan Ditjen Imigrasi sekaligus sebagai bentuk apresiasi serta motivasi bagi seluruh pegawai untuk dapat mewujudkan Perpustakaan Ditjen Imigrasi sebagai pusat literasi keimigrasian di Indonesia."

Dalam kegiatan ini, dihadirkan berbagai moderator dan narasumber yang kompeten. Narasumber tersebut,

antara lain, kepala Perpustakaan Universitas Udayana; pustakawan BMKG; Perpustakaan Nasional dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); kepala Tim Implementasi Beasiswa Bank Indonesia (BI); dan kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Padjadjaran (Unpad). Dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi sebagai upaya peningkatan literasi keimigrasian, seminar kali ini membuka wawasan seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi tentang pojok baca dan perpustakaan digital.

Menariknya, terdapat juga beberapa kategori Library Award 2024 sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang terus menanamkan budaya literasi keimigrasian dan UPT yang berkomitmen dalam mewujudkan konsep GLAM (*galleries, libraries, archives, and museums*). Terdapat 4 UPT pemenang dengan perincian sebagai berikut.

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, dengan kategori "UPT yang Menyimpan Benda-Benda Sejarah Keimigrasian Terbanyak";
2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, dengan kategori "UPT yang Memiliki Pojok Baca Terbaik";
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar, dengan kategori "UPT yang Memiliki Jumlah Pengguna E-Perpustakaan Terbanyak";
4. Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, dengan kategori "UPT yang Memiliki Penyajian Sejarah dalam Bentuk Digital".

Lalu, terdapat 12 pemenang pembaca aplikasi E-Pus teraktif, khususnya salah satu sekuriti Ditjen Imigrasi bernama Legowo. Ia memiliki semangat membaca luar biasa hingga terpilih sebagai Penguji Perpustakaan Direktorat Jenderal Imigrasi Paling Aktif sepanjang tahun 2023. Kepada para pemenang tersebut, seluruh biaya transportasi difasilitasi oleh Perpustakaan Ditjen Imigrasi.

Sebagai upaya menuju pusat literasi keimigrasian di Indonesia, Perpustakaan Ditjen Imigrasi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penyebaran pengetahuan tentang pojok baca UPT seluruh Indonesia dan literasi keimigrasian. Tidak hanya itu, Perpustakaan Ditjen Imigrasi mengusung konsep GLAM yang diharapkan dapat membantu Imigrasi Indonesia mengatur, mengkurasi, merekomendasikan, melestarikan, dan menyebarkan segala informasi keimigrasian. ■

Sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber (Foto: I Ketut Adi Wardana)



Cara Pakai Autogate untuk Anak Usia 6 Tahun ke Atas

Seluruh jenis paspor Indonesia dapat digunakan untuk melewati *autogate* di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai.

1

Pastikan seluruh bagian wajah anak terlihat dengan jelas.

Lepas topi, masker, kacamata, dan lainnya. Sampul paspor harus dibuka sebelum pemindaian paspor.



2

Anak sebagai pelintas melakukan **pemindaian** data secara elektronik pada **halaman biodata paspor** dengan meletakkan halaman biodata di sisi atas.



Berdiri tepat pada label *footstep* berwarna kuning



Jika paspor sudah dipindai, **hadapkan wajah pada layar** di bagian depan untuk pemindaian wajah (*face recognition*) dan **pintu autogate akan terbuka.**

3



Tenang saja!

Petugas akan membantu apabila pelintas mengalami kendala saat menggunakan *autogate*.

CHANDRA DINATA, BERJAGA DENGAN DEDIKASI DAN INTEGRITAS DI BATAS NEGARA

Sejak memulai kariernya di Imigrasi pada 2016, Chandra merupakan sosok yang inspiratif. Di balik kesibukannya sebagai petugas di PLBN Entikong, terdapat cerita menarik tentang dedikasinya.

■ Penulis: Ajeng Dhyanti Paramitha

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong adalah salah satu titik perlintasan penting di Indonesia yang terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. PLBN Entikong berfungsi sebagai pintu gerbang penjaga keluar dan masuk bagi pelintas batas, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) dari dan ke Malaysia.

Di balik kesibukan di PLBN Entikong, terdapat cerita menarik tentang dedikasi salah seorang petugas imigrasi yang menjaga pintu gerbang di sana. Dia adalah Chandra Dinata, seorang pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) yang bertugas di PLBN Entikong. Chandra menjadi salah satu tokoh di balik cerita keberhasilan penangkapan WNI berinisial MS yang termasuk dalam daftar cegah keluar (cekal) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada September 2024.

Kronologi Penangkapan

Pada Minggu (8/8) sekitar pukul 14.30 WIB, Chandra sedang bertugas di rantai keberangkatan Imigrasi PLBN Entikong. Saat itu, sebuah mobil Alphard dengan nomor pelat KB 1157 QT tiba di portal rantai keberangkatan. Turunlah salah satu penumpang dari mobil tersebut dalam kondisi sakit. Chandra diminta untuk membantu membubuhkan cap tanda keluar dari wilayah Indonesia.

Dengan sigap, Chandra mengambil paspor penumpang tersebut dan menyerahkannya kepada Bayu Ragil

Pangestu. Bayu bertugas sebagai polisi khusus Imigrasi (polsusim) di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Entikong. Setelah itu, mereka bersama-sama menyerahkan paspor kepada Muhammad Tri Haikal Akbar Ananda selaku petugas konter keberangkatan. Di sinilah Chandra mendapatkan informasi penting bahwa penumpang berinisial MS tersebut ternyata masuk dalam daftar cekal dari wilayah Indonesia. Setelah ditelusuri, MS didaftarkan dalam daftar cekal atas permintaan Kemenkeu. Pendaftaran ini berkaitan dengan kewajiban piutang negara yang belum dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Chandra segera berkoordinasi dengan supervisornya yang memerintahkan agar dia menjemput MS dari mobil dan membawanya ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tindakan ini merupakan bagian dari prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa setiap pelintas batas yang mencurigakan dapat ditangani dengan tepat.

Kejadian tersebut menunjukkan bagaimana petugas imigrasi berperan penting dalam menjaga keamanan di

perbatasan dengan menerapkan standar operasional prosedur (SOP). Dengan penanganan yang cepat dan profesional, Chandra bersama semua petugas imigrasi PLBN Entikong berhasil melakukan pencegahan terhadap MS sebelum meninggalkan Indonesia. Upaya ini menunjukkan integritas dan profesionalisme seluruh petugas imigrasi PLBN Entikong demi menjaga pintu gerbang negara Indonesia.

Pelayanan publik petugas imigrasi sering kali tak terekspos. Padahal, peran mereka sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perbatasan. Mari, kenali lebih jauh Chandra Dinata yang telah mengabdikan untuk Imigrasi sejak 2016.

Kebanggaan Menjaga Perbatasan

Chandra Dinata lahir di Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia memulai kariernya di Imigrasi pada 2016 dan menghabiskan waktu hingga 2020 di PLBN Entikong sebelum dipindahkan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong. Kemudian, dia kembali bertugas di PLBN Entikong pada April 2023. Bagi Chandra, kembali bertugas di PLBN Entikong adalah sebuah kebanggaan tersendiri, mengingat dia merupakan warga asli daerah perbatasan tersebut.

"Saat saya ditempatkan di PLBN Entikong, saya merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ini adalah tempat saya dibesarkan, dan kini saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga perbatasan negara saya," ungkap Chandra. Baginya, penempatannya di

KEJADIAN TERSEBUT MENUNJUKKAN BAGAIMANA PETUGAS IMIGRASI BERPERAN PENTING DALAM MENJAGA KEAMANAN DI PERBATASAN DENGAN MENERAPKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP).

PLBN bukan hanya sebuah pekerjaan, melainkan juga panggilan untuk melindungi dan melayani masyarakat.

Namun, bertugas di PLBN Entikong tentu bukan tanpa tantangan. "Suka dan duka itu adalah bagian dari tugas. Saya selalu berupaya untuk bekerja sesuai dengan SOP dan menjalankan perintah pimpinan dengan baik," ujar Chandra.

Chandra juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi di PLBN. "Hubungan dan dinamika antarpetugas di PLBN Entikong sangat

baik. Hal ini memudahkan kami dalam melaksanakan tugas," tambahnya. Sinergi yang terjalin antarinstansi tidak hanya memperlancar proses kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

Harapan Masa Depan

Saat melihat ke depan, Chandra memiliki impian besar. "Saya berharap bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Entikong," kata Chandra. Keinginan ini mencerminkan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam melayani masyarakat dan menjaga kedaulatan negara.

Kisah Chandra Dinata hanyalah satu dari banyak cerita di balik perjuangan petugas imigrasi di garis depan pintu gerbang negara. Dedikasinya dalam menjaga perbatasan patut dicontoh serta dijadikan inspirasi bagi kita untuk lebih menghargai peran petugas publik dalam kehidupan sehari-hari. ■



Chandra Dinata, petugas imigrasi penjaga PLBN Entikong (Sumber: Dok. Pribadi)

SEBELUM MASUK KE INDONESIA, PENDATANG WAJIB LAPORKAN BARANG DAN KONDISI KESEHATAN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meminimalkan kerugian maupun gangguan dari luar Indonesia. Setiap pendatang dari luar negeri wajib melaporkan barang bawaan maupun kondisi kesehatannya sebagai bagian dari upaya manajemen risiko di perbatasan negara.

■ Penulis: Jimmy Asmoro

Sahabat Mido yang baru pulang dari luar negeri atau warga negara asing (WNA) yang ingin ke Indonesia wajib mengisi formulir swadeklarasi terkait barang dan kesehatan. Swadeklarasi barang bawaan dilakukan melalui tautan ecd.beacukai.go.id dan pengisiannya dapat dilakukan 2 hari sebelum kedatangan hingga 1 hari setelah kedatangan. Sementara itu, swadeklarasi kesehatan dilakukan melalui ssh.p.kemkes.go.id.

Swadeklarasi berupa *electronic customs declaration* (e-CD) adalah formulir deklarasi elektronik bea cukai. Melalui e-CD, penumpang maupun awak sarana pengangkut yang datang dari luar negeri melaporkan barang bawaan mereka, termasuk barang pribadi, hadiah, dan barang dagangan. Tujuannya untuk mempermudah pemeriksaan bea cukai dan mencegah masuknya barang ilegal. Dengan mengisi e-CD, penumpang maupun awak sarana pengangkut dapat membantu memperlancar proses kepabeanan serta berkontribusi menjaga keamanan negara.

Laporkan Barang dengan e-CD

Pengisian e-CD bertujuan untuk **meningkatkan efisiensi** pemeriksaan bea cukai sehingga menjadi lebih cepat dan lancar, serta **mencegah penyelundupan**. Data yang lengkap memudahkan petugas bea cukai untuk mengidentifikasi barang-barang yang dilarang atau dibatasi. Selain itu, pengisian e-CD juga dapat **meningkatkan keamanan**. Data yang

diperoleh dari e-CD dapat digunakan untuk menganalisis risiko keamanan yang bisa terjadi.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pendatang tentang pengisian e-CD.

■ Data Pribadi

Penumpang maupun awak sarana pengangkut wajib mengisikan data pribadi dengan lengkap dan benar, termasuk nama, nomor paspor, dan nomor penerbangan.

■ Barang Bawaan

Penumpang maupun awak sarana pengangkut wajib melaporkan semua barang bawaan, baik yang dibagikan maupun dibawa tangan.

■ Nilai Barang

Penumpang maupun awak sarana pengangkut memperkirakan nilai barang bawaannya untuk menentukan apakah barang tersebut dikenakan bea masuk atau tidak.

■ Kode QR

Setelah mengisi e-CD, penumpang maupun awak sarana pengangkut

akan mendapatkan kode QR yang harus ditunjukkan kepada petugas bea cukai.

Setelah menunjukkan kode QR, penumpang maupun awak sarana pengangkut dari luar negeri akan diarahkan ke jalur hijau atau merah. Jalur hijau digunakan untuk penumpang maupun awak sarana pengangkut tanpa barang bawaan yang perlu diperiksa lebih lanjut, sedangkan jalur merah digunakan untuk mereka yang perlu dilakukan pemeriksaan fisik.

Hal-Hal yang Penting untuk Diingat

Setidaknya ada tiga hal yang perlu diingat oleh para penumpang maupun awak sarana pengangkut mengenai barang bawaan dari luar negeri.

■ Barang Pribadi

Penumpang maupun awak sarana pengangkut yang datang dari luar negeri diperbolehkan membawa barang pribadi dengan nilai maksimal 500 dolar Amerika Serikat (AS) tanpa dikenakan bea masuk.

■ Barang Larangan

Beberapa jenis barang dilarang masuk ke Indonesia, seperti narkoba, senjata api, dan satwa liar.

■ Barang Pembatasan

Beberapa jenis barang memerlukan izin khusus untuk dapat dibawa masuk.

PENGISIAN E-CD BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PEMERIKSAAN BEA CUKAI SEHINGGA MENJADI LEBIH CEPAT DAN LANCAR, SERTA MENCEGAH PENYELUNDUPAN.

Laporkan Kondisi Kesehatan dengan SATUSEHAT

Selain mengisi swadeklarasi barang yang dibawa, prosedur lain yang harus dilakukan setiap pendatang dari luar negeri adalah mengisi SATUSEHAT Health Pass. SATUSEHAT Health Pass



Sumber: freepik.com

adalah sistem digital yang berfungsi untuk memantau status kesehatan para pendatang. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 5 Tahun 2024, per 26 Agustus 2024 setiap orang yang tiba dari luar negeri wajib mengisi data kesehatan melalui aplikasi SATUSEHAT. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memperketat pemeriksaan kesehatan di pintu masuk negara, khususnya di bandara, guna mencegah masuknya varian baru Mpx (cacar monyet) ke Indonesia.

Melalui surat edaran tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menginstruksikan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melayani penerbangan luar negeri untuk melakukan empat upaya pencegahan penyebaran penyakit Mpx di dalam negeri. Salah satunya adalah menyosialisasikan dan menginformasikan kepada setiap

pelaku perjalanan yang akan terbang ke Indonesia untuk mengisi SATUSEHAT Health Pass sebelum keberangkatan.

Para pendatang harus mengisi SATUSEHAT Health Pass, baik sebelum maupun saat *check-in* keberangkatan, guna mencegah penumpukan penumpang di pintu masuk negara. Pengisian formulir ini dapat dilakukan secara daring melalui laman sshp.kemkes.go.id sehingga pelaku perjalanan tidak perlu mengunduh aplikasi baru.

Setelah formulir diisi, muncul kode batang (*barcode*) yang berisi riwayat

LANGKAH INI MERUPAKAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MEMPERKETAT PEMERIKSAAN KESEHATAN DI PINTU MASUK NEGARA, KHUSUSNYA DI BANDARA.

kesehatan dan perjalanan penumpang. Kode batang tersebut akan dipindai oleh petugas di pintu kedatangan bandara. Setelah kode batang dipindai, selanjutnya silakan disimpan. Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) M. Syahril menjelaskan bahwa pendatang yang mengalami sakit dalam waktu 21 hari setelah bepergian ke luar negeri, atau berasal dari negara atau daerah endemik yang terkena dampak, harus segera mencari perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menunjukkan kode batang SATUSEHAT Health Pass kepada petugas kesehatan.

Baik e-CD maupun SATUSEHAT Health Pass merupakan bagian dari *early warning system* petugas di garda terdepan Indonesia untuk mengantisipasi kerugian maupun gangguan dari luar Indonesia. Dengan mengisi keduanya, berbagai kerugian maupun gangguan dari luar negeri dapat ditekan seminimal mungkin. ■

NESTAPA DI BALIK SURGA WISATA

Bahaya mengintai anak-anak yang tinggal di daerah-daerah tujuan wisata populer di Indonesia. Wisata seks anak atau *child sex tourism* menjadi ancaman yang menuntut perhatian besar dari berbagai pihak. Penegakan undang-undang dirasa belum maksimal dalam mencegah kejahatan ini.

■ Penulis: Utut Muhammad (Pemegang *Work and Holiday Visa* Australia)

Di Indonesia, wisata seks anak (*child sex tourism/ CST*) menjadi perhatian besar karena banyaknya kasus wisatawan domestik dan mancanegara yang mengeksploitasi anak-anak yang rentan. Kejahatan ini, yang menargetkan daerah miskin, melanggengkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan menghancurkan kehidupan anak-anak. Untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan memerangi eksploitasi ini, tindakan diperlukan dengan segera.

Marak di Destinasi Wisata

Wisata seks anak muncul di tujuan-tujuan wisata populer di Indonesia, seperti Jakarta, Batam, dan Bali. "Industri" eksploitasi ini menyasar anak-anak dalam jumlah yang tinggi. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memperkirakan bahwa ribuan anak dieksploitasi secara seksual setiap tahun.

Anak-anak berisiko mengalami eksploitasi seksual karena penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak memadai di Indonesia, terutama di daerah tertinggal. Pelaku kejahatan eksploitasi anak di Indonesia sering kali memanfaatkan ambiguitas hukum dengan asumsi bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi hukum yang minimal atau tidak sama sekali. Riset ECPAT Indonesia (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual*

Purposes) pada 2016 menunjukkan bahwa sekitar 40.000 hingga 70.000 anak di bawah umur di Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual, khususnya di Pulau Jawa.

Berakar dari Kemiskinan

Di Indonesia, kemiskinan adalah akar penyebab utama wisata seks anak (ECPAT International, 2016). Banyak korban hidup dalam kemiskinan ekstrem. Keluarga disesatkan atau dipaksa untuk mengizinkan anak-anak mereka dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan finansial. Eksploitasi anak-anak di bawah umur ini dilakukan melalui perdagangan seks.

Di sisi lain, internet juga berperan melanggengkan kejahatan ini. Internet telah memfasilitasi praktik wisata seks anak dengan memungkinkan pelaku berkomunikasi dan berkoordinasi lintas batas melalui penggunaan platform dalam jaringan (daring).

Dampak Buruk pada Korban

Dampak dari wisata seks anak adalah bencana bagi para korbannya. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual sering mengalami cedera fisik dan masalah kesehatan jangka panjang, seperti penyakit menular seksual (PMS). Secara psikologis, para korban rentan terkena gangguan kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Selain itu, banyak korban menjadi sasaran stigma sosial yang mengisolasi

mereka dari pergaulan dan membuat reintegrasi ke dalam masyarakat menjadi sangat menantang. Itu dapat menyebabkan mereka sulit mengakses layanan pendidikan dan mencari pekerjaan ketika dewasa nanti. Anak-anak ini dibiarkan melanjutkan hidup dengan keterbatasan layanan pemulihan dan kelangkaan sumber daya untuk merekonstruksi kehidupan mereka. Hal ini mengakibatkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan marginalisasi.

Inisiatif Pemerintah dan Kerangka Hukum

Dalam upaya memerangi wisata seks anak, pemerintah Indonesia telah menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat menjerat pelaku eksploitasi anak. Namun demikian, penegakan hukum terus menjadi tantangan, terutama di daerah pedesaan yang sumber dayanya terbatas. Tindakan penghukuman sering terhambat oleh korupsi dan rumitnya birokrasi yang memungkinkan pelaku menghindari dari hukuman.

Dalam upaya memerangi eksploitasi anak, pemerintah Indonesia juga telah menandatangani perjanjian internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak. Namun, terlepas dari adanya perjanjian internasional ini, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) MEMPERKIRAKAN BAHWA RIBUAN ANAK DIEKSPLOITASI SECARA SEKSUAL SETIAP TAHUN.

negara lain secara lebih intens untuk memantau pelaku yang bepergian ke Indonesia.

Ada pula undang-undang ekstrateritorial yang telah diterapkan oleh negara-negara lain, seperti Australia. Undang-undang ini memungkinkan warga negaranya untuk dituntut atas pelanggaran yang dilakukan di luar negeri. Namun, untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan, dibutuhkan peningkatan kolaborasi.

Pencegahan dari Berbagai Sisi

Untuk mengatasi wisata seks anak di Indonesia, perlu dilaksanakan lebih dari sekadar reformasi hukum. Sangat penting untuk memberikan fasilitas pembinaan kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah berisiko tinggi, untuk mencegah eksploitasi anak. Kerusakan jangka panjang yang disebabkan oleh kejahatan eksploitasi anak dan perlunya melindungi hak-hak anak harus menjadi fokus utama publik.

Selain itu, sektor pariwisata harus memiliki fungsi penting. Kebijakan untuk mencegah eksploitasi anak harus diterapkan di berbagai sisi, misalnya pada maskapai penerbangan, hotel, dan operator tur. Ini menjadi inisiatif global yang menetapkan pedoman untuk mencegah eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata.

Untuk mengurangi kerentanan, penting untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui sektor ekonomi dan pendidikan. Upaya untuk mencegah timbulnya korban perdagangan manusia dapat dilakukan ketika keluarga menyadari risiko dan bahaya eksploitasi anak dan memiliki pendapatan yang stabil. Untuk meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang berisiko mengalami eksploitasi, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan organisasi internasional.

Wisata seks anak di Indonesia harus menjadi perhatian serius. Untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, sangat penting untuk memperkuat hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan memberdayakan masyarakat. ■

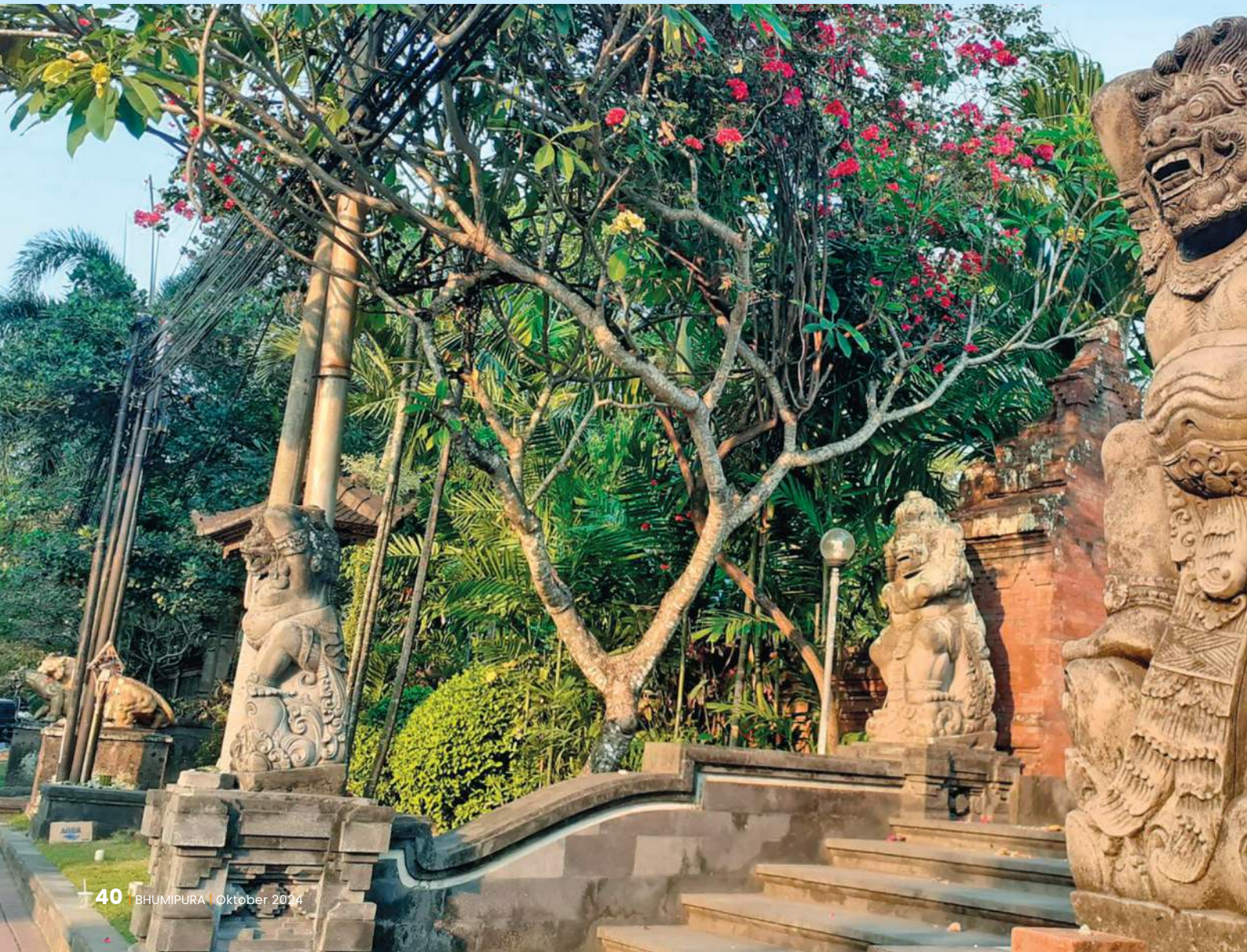
Menilik Sejarah dan Filosofi Imigrasi:

INI TENTANG NEGARA

Peran keimigrasian dalam sebuah negara tidak sekadar mengatur lalu lintas orang, tetapi juga mencerminkan identitas dan kedaulatan negara tersebut. Dengan memahami sejarah dan filosofi yang melatarbelakangi keimigrasian, kita dapat melihat betapa pentingnya fungsi ini dalam membentuk entitas politik yang kompleks.

■ Penulis: Pitono

Negara, sebagai entitas politik yang kompleks, senantiasa dihadapkan pada beragam isu yang dinamis dan saling berkaitan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mendefinisikan negara sebagai 'organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi



yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya’.

Agar dapat dikategorikan sebagai negara, suatu entitas harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu memiliki wilayah yang jelas, populasi penduduk, sistem pemerintahan yang sah, dan kekuasaan tertinggi (kedaulatan) atas wilayahnya.

Wilayah merupakan unsur terbentuknya suatu negara yang mencakup daratan, perairan, dan udara yang menjadi batas-batas negara tersebut. Sementara itu, penduduk merupakan unsur negara yang terdiri atas rakyat (warga negara) yang tinggal di wilayah negara tersebut

dan warga negara lain yang diizinkan untuk menetap. Unsur pemerintahan negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayah negara. Unsur terakhir, kedaulatan, menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Keimigrasian di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan unsur kedaulatan yang memiliki peran strategis dalam entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 mendefinisikan keimigrasian sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari pengertian tersebut, keimigrasian mengatur semua unsur eksistensi negara, segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas “orang”, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang masuk atau keluar “wilayah” Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya “kedaulatan” negara.

Semua unsur eksistensi negara pada hakikatnya dijalankan oleh institusi Imigrasi. Hal ini memberikan pemahaman yang tegas bahwa peran dan fungsi Imigrasi adalah multidimensional dalam kehidupan bernegara. Dengan kalimat yang lebih tajam, sesungguhnya memikirkan keimigrasian berarti memikirkan negara.

Berkaca dari sejarah keimigrasian di negara modern dan kerajaan, nyatanya fungsi keimigrasian memainkan peranan yang sangat penting. Bahkan, terdapat beberapa negara yang terbentuk karena pelaksanaan fungsi keimigrasian. Contohnya, migrasi orang Inggris ke Amerika, Australia, Afrika Selatan, Kanada, Zimbabwe, Selandia Baru, dan wilayah-wilayah lain memengaruhi gagasan kebangsaan, wilayah, dan konsep negara pada wilayah yang dituju. Tidak hanya terhadap wilayah tersebut, tetapi juga gagasan kebangsaan dan kewarganegaraan Kerajaan Inggris itu sendiri.

Di Nusantara, proses keimigrasian setidaknya terekam dari bukti-bukti peninggalan arkeologis. Migrasi orang asing ke wilayah Nusantara terjadi di masa Medang atau Mataram Kuno, terekam di Prasasti Kancana (abad 9 M). Prasasti ini menjelaskan adanya profesi “juru cina” dan “juru barata”

KEIMIGRASIAN DI INDONESIA TIDAK TERLEPAS DENGAN UNSUR KEDAULATAN YANG MEMILIKI PERAN STRATEGIS DALAM ENTITAS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).

yang merupakan gelar bagi petugas yang mengurus orang Cina dan India. Jabatan tersebut semacam posisi pejabat Imigrasi pada saat ini.

Prasasti Wurudu Kidul (922 M) menyebutkan adanya golongan orang asing (warga kilalan). Terdapat juga keterangan yang berasal dari masa Airlangga (Kerajaan Kahuripan), yaitu Prasasti Cane bertarikh 1021 M. Prasasti ini menyebutkan adanya warga kilalan (warga yang dikenai pajak khusus). Selain itu, Prasasti Balawi (1305 M) yang merupakan sumber arkeologi tertua pada masa Majapahit mencatat keberadaan orang asing. Prasasti ini menyebutkan adanya orang asing dari Keling, Arya, Singhala, Karnnataka, Bahlara, China, Campa, Mandikira, Remin, Khmer, Bebel, dan Mamban.

Satu hal yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana nenek moyang Nusantara menggambarkan sosok “penjaga pintu gerbang”. Kini gambaran itu menjadi slogan para pejabat Imigrasi, yaitu sosok Dwarapala (Reco Penthung atau Arca Bergada). Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Dwarapala memiliki dua wujud, yaitu “*ugra*” (bengis, mengancam tamu yang berniat jahat) dan “*santa*” (damai, memberikan perlindungan bagi tamu yang berniat baik). Dwarapala selalu digambarkan sebagai sosok yang kuat dan besar (raksasa), melambangkan tanggung jawab yang juga besar.

Saat ini, Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara juga memiliki karakter “*ugra*” dalam hal penegakan hukum dan “*santa*” dalam hal pelayanan perizinan. Mungkin seharusnya, Imigrasi merupakan institusi yang benar-benar kuat, mandiri, dan kokoh—jika tidak ingin disebut sebagai raksasa—agar sesuai dengan filosofi Dwarapala, dengan persenjataan *penthung* yang besar, seimbang dengan beban tanggung jawabnya. ■

Pasangan Dwarapala di Pura Dalem Cungkub Kerobokan, Desa Adat Kerobokan (Sumber: etnis.id/MayaArina)



Labubu Diburu:

RUANG INTERAKSI MAKNA DALAM BUDAYA POPULER

Popularitas boneka Labubu tak hanya membuat para pembeli rela antre mengular berjam-jam, tetapi juga memunculkan banyak sentimen negatif. Fenomena ini tak semata-mata menarik diperbincangkan dari sisi ekonomi maupun estetika, tetapi juga dari nilai budaya hingga ideologis yang mengikutinya.

■ Penulis: Nuri Ikhwana

Fenomena perburuan boneka Labubu di kalangan anak muda, terutama di Indonesia, menjadi salah satu contoh bahwa produk budaya populer bukan

hanya menjadi hiburan atau komoditas, melainkan juga ruang berinteraksinya makna, ideologi, dan identitas sosial. Labubu adalah boneka berpenampilan mirip monster yang diproduksi oleh

Pop Mart. Boneka ini memiliki bulu berwarna-warni, telinga panjang, dan gigi runcing yang dilengkapi dengan seringai lebar.

Karya Seniman Asal Hong Kong

Labubu merupakan satu dari lima karakter dalam kelompok makhluk fiktif yang dikenal sebagai The Monster. Karakter ini dikreasikan oleh Kasing Lung, seniman kelahiran Hong Kong yang pada 1972 pindah ke Belanda bersama keluarganya. Menghabiskan masa kecil di Belanda membuat



Sumber: zetizens.id

**STUART HALL
MENEKANKAN BAHWA
BUDAYA POPULER
TIDAK PERNAH NETRAL.
IA ADALAH TEMPAT
BERLANGSUNGNYA
PERTARUNGAN
KEKUASAAN, TEMPAT
IDEOLOGI DIPRODUKSI DAN
DIPERTAHANKAN, TETAPI
JUGA DITANTANG DAN
DIRUNDINGKAN.**

sang kreator tertarik pada kapal feri dan peri yang muncul dalam tradisi cerita rakyat Nordik.

Pada 2015, Kasing Lung menciptakan karakter The Monster, termasuk Labubu. Karakter Labubu yang unik pun menjadi sangat populer dan menarik perhatian masyarakat sehingga pada 2019 Kasing Lung menandatangani perjanjian lisensi eksklusif dengan Pop Mart. Kini, harga boneka Labubu itu dibanderol mulai dari Rp300 ribu hingga Rp15 juta. Dengan harga tersebut, pembeli rela antri mengular berjam-jam untuk mendapatkannya. Bahkan, berbagai jenis Labubu, termasuk gantungan kunci hingga boneka, sudah habis terjual di situs resmi Pop Mart.

Produk Budaya Populer

Fenomena Labubu dapat ditelaah dari pandangan budaya populer Stuart Hall, sosiolog asal Jamaika. Dalam pandangan budaya populer, Labubu bisa dipahami sebagai situs ideologis. Artinya, karakter ini telah melibatkan berbagai kelompok sosial dalam "negosiasi makna" melalui konsumsi dan representasi produknya. Dalam "negosiasi makna", orang-orang secara bersama-sama mencoba memahami dan memberikan arti pada sesuatu.

Stuart Hall menekankan bahwa budaya populer tidak pernah netral. Budaya populer adalah tempat berlangsungnya "pertarungan kekuasaan", yaitu tempat ideologi diproduksi dan dipertahankan, tetapi juga ditantang dan dirundingkan. Dalam konteks ini, Labubu sebagai produk budaya populer memiliki makna berlapis dan tidak tunggal. Bagaimana produk ini diterima, dikonsumsi, dan direpresentasikan oleh audiensnya

mencerminkan dinamika sosial dan kultural yang kompleks.

Sarana Ekspresi Diri

Bagi Stuart Hall, budaya populer adalah salah satu sarana penting dalam penyebaran dan penegakan ideologi (sistem keyakinan, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat). Produk-produk budaya populer, seperti Labubu, dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme ideologi. Melaluinya, tanpa disadari, mereka menyampaikan nilai-nilai yang diterima oleh konsumen.

Di sisi lain, budaya populer juga menyediakan ruang bagi resistensi ideologis. Konsumen, terutama generasi muda yang membeli dan menggunakan produk Labubu, tidak selalu secara pasif menerima makna yang diberikan oleh pencipta atau produsen. Sebaliknya, mereka dapat menafsirkan ulang produk tersebut dan menggunakannya sebagai sarana mengekspresikan ideologi atau identitas mereka sendiri. Misalnya, beberapa penggemar Labubu mungkin memandang karakter ini sebagai simbol estetika (keindahan) atau gaya hidup untuk mengekspresikan selera artistik mereka.

Makna dalam Konsumsi Labubu

Produk seperti Labubu, dengan desain karakter unik dan menggemaskan, bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap konsumen. Bagi sebagian konsumen, Labubu mungkin sekadar simbol dari gaya hidup yang lucu dan menyenangkan. Sementara itu, bagi konsumen yang lain, ia dapat dilihat sebagai representasi perlawanan terhadap budaya dominan yang menekankan keseriusan dan efisiensi. Dalam konteks ini, Labubu bisa menjadi medium bagi individu untuk mengekspresikan diri mereka melalui estetika yang ringan dan *playful*.

Bagi sebagian konsumen lainnya, boneka Labubu dapat dianggap sebagai sarana mengekspresikan siapa mereka dan apa yang mereka yakini. Sebagian penggemar boneka ini tidak hanya mengonsumsi produk ini sebagai barang, tetapi juga simbol identitas. Sebagai contoh, koleksi Labubu bisa menjadi cara bagi seseorang untuk menunjukkan keanggotaan mereka dalam kelompok

sosial yang lebih besar, seperti komunitas pencinta budaya *kawaii* atau penggemar desain karakter lucu. Penggunaan Labubu dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam bentuk *merchandise*, pakaian, atau aksesori, juga bisa mencerminkan bagaimana individu menegosiasikan identitas mereka di hadapan orang lain.

Meskipun Labubu menuai banyak sentimen negatif, tidak dapat dimungkiri bahwa Labubu menunjukkan pentingnya kreativitas dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Kita diajak untuk mengeksplorasi identitas kita melalui produk yang kita pilih dan menciptakan makna yang lebih personal dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, konsumsi produk pun tidak hanya berkaitan dengan barang fisik, tetapi juga nilai dan makna yang bisa diperoleh darinya. Oleh karena itu, kita sebaiknya lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Kita perlu memastikan bahwa pilihan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan identitas kita, bukan hanya karena terpengaruh oleh kepuasan konsumerisme yang sifatnya hanya sementara. ■

Sumber: www.rri.co.id





Pulau Senua di perairan Natuna (Foto: Arif Rahman Suryaman)

Pulau Senua, PERMATA TERSEMBUNYI DI INDONESIA BAGIAN UTARA

Sebagai salah satu pulau terluar Indonesia, Pulau Senua memiliki keindahan memesona. Pulau ini menjadi simbol semangat nasionalisme, dedikasi, dan perjuangan untuk menjaga kedaulatan negara.

■ Penulis: Yanos Okterano

Senua namanya, pulau tak berpenghuni nan tersembunyi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pulau ini adalah surga bagi para pencinta keindahan alam. Dengan pantai berpasir putih yang memesona, air laut yang jernih, dan formasi bebatuan unik di sepanjang pantainya, Pulau Senua juga memiliki nilai konservasi yang tinggi sebagai bagian dari kawasan geosite di Natuna. Letaknya yang

strategis sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara menambah daya tarik tersendiri.

Keindahan yang Terjangkau

Kita bisa mencapai Pulau Senua dengan mengendarai kapal pompong berkapasitas 20 orang dari Ranai. Cukup merogoh kocek sebesar Rp500.000, kita bisa diantar-jemput ke Pulau Senua oleh nelayan setempat.

Jangan salah, biaya tersebut bukan tarif sewa per orang, melainkan per kapal. Cukup terjangkau, bukan?

Perjalanan menuju Pulau Senua memakan waktu kurang lebih 30 menit. Begitu berlabuh, kaki kita akan menjejak di dermaga apung yang mengantar kita ke bukit batu kecil sebelum bisa menapak pasir pantai Pulau Senua. Hanya semak belukar dan pohon kelapa yang turut menyaksikan indahnya pantai dan jernihnya laut di perairan Pulau Senua.

Wisata ini juga cocok bagi petualang pemburu *hidden gem* yang tidak segan merogoh kocek yang dalam untuk merasakan rasanya menjadi pemilik pulau pribadi meski



TERSEMBUNYI DI ANTARA RATUSAN KEPULAUAN RIAU, PULAU SENUA HADIR SEBAGAI PERMATA TAK TERNILAI BAGI PARA PENJELAJAH YANG HAUS AKAN KEINDAHAN ALAM.

Di sekitar Ranai, terbentang luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seperti perikanan dan potensi energi. Sayangnya, letak geografis yang strategis ini juga menjadikannya titik perhatian dunia, terutama terkait sengketa wilayah. Laut Natuna, yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia, sempat menjadi sorotan internasional akibat klaim kepemilikan sepihak dari negara tetangga. Kejadian ini makin menggarisbawahi pentingnya kehadiran negara di wilayah terluar seperti Ranai.

Rumah bagi Penjaga Bangsa

Ranai memiliki karakteristik yang unik. Sebagian besar penduduknya adalah para pegawai negeri yang secara sukarela atau diandalkan negara untuk bertugas di pulau terdepan ini. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang rela meninggalkan kenyamanan kota besar untuk menjaga kedaulatan negara. Dedikasi mereka patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi bangsa ini.

Selain sebagai benteng pertahanan negara, Ranai juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Potensi maritimnya yang luar biasa, keindahan alamnya yang masih terjaga, serta keramahan masyarakatnya bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Namun, pengembangan wilayah ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta kondisi geografis yang sulit.

Ranai lebih dari sekadar wilayah terluar Indonesia. Ia adalah simbol semangat nasionalisme, dedikasi, dan perjuangan untuk menjaga kedaulatan negara. Keberadaan Ranai mengingatkan kita akan pentingnya menjaga wilayah terluar sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, Ranai dapat menjadi contoh sukses pembangunan wilayah terluar yang berkelanjutan dan sejahtera.

Bagaimana? Tertarik datang ke Ranai dan mengunjungi Pulau Senua? ■

hanya sehari. Untuk mencapai Ranai dari Batam, pengunjung harus menggunakan pesawat ATR yang harga sekali jalannya sama dengan tarif pulang-pergi maskapai bintang lima tujuan Jakarta-Batam kelas ekonomi. Sungguh jumlah yang fantastis. Jelas, pilihan mencapai Senua dari luar Ranai bukan untuk kaum *mendang-mending*.

Memanjakan Mata dan Jiwa

Tersembunyi di antara ratusan pulau yang menghiasi Kepulauan Riau, Pulau Senua hadir sebagai permata tak ternilai bagi para penjelajah yang haus akan keindahan alam. Pulau ini bagaikan lukisan alam, dengan pantai-pantai berpasir putih lembut yang membentang luas dan air laut yang jernih kebiruan.

Jauh dari hiruk pikuk perkotaan, Pulau Senua menawarkan ketenangan dan kedamaian yang sempurna bagi yang ingin melarikan diri sejenak dari rutinitas. Keindahan bawah lautnya yang memukau dengan terumbu karang berwarna-warni dan beragam

jenis ikan turut menambah pesona pulau ini. Bagi pencinta snorkeling dan *diving*, Pulau Senua adalah surga yang tak boleh dilewatkan.

Namun, selain berenang dan mengabadikan pemandangan dengan kamera, tidak banyak yang bisa kita lakukan tanpa persiapan sebelumnya. Wisatawan yang ingin snorkeling dan *diving* harus bersiap membawa peralatan sebelum tiba. Perbekalan seperti air minum dan makanan pun jangan sampai lupa dibawa. Peralannya, tidak ada penjual makanan dan minuman di pulau ini, apalagi penyewaan alat snorkeling dan *diving*.

Letak Strategis di Garis Batas

Ranai atau yang lebih dikenal sebagai Natuna adalah salah satu permata tersembunyi Indonesia yang terletak di ujung utara negara kepulauan ini. Posisinya yang strategis sebagai pulau terluar menjadikan Ranai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KEHADIRAN E-PASPOR DI SYDNEY DAN KABAR *GOLDEN VISA* DARI WASHINGTON D.C.

KJRI Sydney resmi meluncurkan layanan paspor elektronik. Di belahan dunia lainnya, pemerintah Indonesia memperkenalkan *golden visa* di Washington D.C. Dua kabar terbaru ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan layanan keimigrasian.

■ Penulis: Ajeng Rahma Safitri

Bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, Australia, Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi meresmikan layanan paspor elektronik (e-paspor) pada Rabu (4/9). Peresmian layanan e-paspor di KJRI Sydney merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia

dan Peringatan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia. Acara ini sekaligus mengukuhkan KJRI Sydney sebagai perwakilan RI pertama di kawasan Pasifik dan Oseania yang dapat menerbitkan paspor elektronik.

"Pembukaan layanan paspor elektronik di KJRI Sydney diharapkan dapat memberi kenyamanan dan

meningkatkan kepuasan layanan keimigrasian kepada warga negara Indonesia yang bermukim di Australia, khususnya Sydney," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim.

Silmy menambahkan, KJRI Sydney merupakan perwakilan RI kedelapan yang melayani penerbitan e-paspor. Sebelumnya, Ditjen Imigrasi membuka layanan e-paspor di perwakilan RI di Singapura, Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), Den Haag (Belanda), Jeddah (Arab Saudi), Los Angeles (Amerika Serikat), dan Berlin (Jerman).

e-Paspor dilengkapi dengan cip yang menyimpan data biometrik. Dengan fitur keamanan yang lebih mutakhir, e-paspor lebih aman

Pengarahan oleh Dirjen Imigrasi dalam kunjungannya di Los Angeles (Foto: Della Dinda Bevani)



dari potensi pemalsuan. Hal ini juga memudahkan WNI di Australia yang kerap melakukan perjalanan internasional karena proses pemeriksaan imigrasi yang lebih mulus (*seamless*). Kemudahan akses e-paspor juga membantu WNI di luar negeri saat mengajukan visa ke negara lain, terutama yang memiliki preferensi *visa approval* lebih mudah kepada pengguna paspor elektronik.

Acara peresmian layanan e-paspor di KJRI Sydney juga dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Duta Besar RI untuk Australia Siswo Pramono, Konsul Jenderal RI Vedi Kurnia Buana, serta masyarakat Indonesia di Sydney. Sebagai simbol peresmian layanan e-paspor, Dirjen Imigrasi Silmy Karim memberikan e-paspor kepada Suherli Handajani, WNI di New South Wales yang berulang tahun ke-93 pada Oktober 2024. Ia kemudian memberikan e-paspor kepada WNI berusia lima tahun, Asia Pithioud yang saat ini tinggal di Sydney.

Ditjen Imigrasi mulai membuka layanan e-paspor di perwakilan RI dengan peresmian pertama yang dilakukan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag, Belanda pada Oktober 2023. Selanjutnya, penerbitan paspor elektronik diimplementasikan pada kantor imigrasi di seluruh Indonesia pada April 2024.

Sementara itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan *golden visa* kepada warga negara asing (WNA) di WOW Indonesia! Festival 2024 di Washington D.C., Amerika Serikat (AS), Minggu (25/8) siang waktu setempat. Sepanjang gelaran tersebut, lebih dari 200 WNA dan eks-WNI antusias menggali informasi tentang *golden visa* Indonesia serta beberapa jenis visa lainnya di gerai Ditjen Imigrasi.

"Kami hadirkan langsung pejabat yang kompeten dari Ditjen Imigrasi untuk memberikan edukasi dan menjawab berbagai pertanyaan warga AS tentang visa Indonesia, khususnya *golden visa*, serta mekanisme untuk mendapatkannya. Saya turut memantau kegiatan tersebut dan melihat antusiasme warga AS yang luar biasa terhadap *golden visa*," ujar Dirjen Imigrasi Silmy Karim pada Senin (26/8).

Silmy menyebut, tingginya antusiasme terhadap *golden visa*



Dirjen Imigrasi Silmy Karim dalam peresmian layanan paspor elektronik di perwakilan RI di luar negeri (Foto: Dok. Humas Ditjen Imigrasi)

di festival Indonesia terbesar di AS merupakan pertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional melihat prospek investasi yang menjanjikan di Indonesia.

Mendukung pernyataan tersebut, Direktur Izin Tinggal Keimigrasian Agato P. P. Simamora mengatakan, pengunjung yang meminta informasi di gerai Golden Visa Indonesia terdiri atas beberapa kelompok. "Yang terbanyak adalah eks-WNI atau WNI yang memiliki pasangan WNA (perkawinan campur), kemudian WNA yang ingin menghabiskan masa tuanya di Indonesia. Selain itu, banyak juga WNA yang belum pernah ke Indonesia. Mereka bertanya tentang visa kunjungan dan *visa on arrival*. Tim kami juga membantu pengunjung yang ingin [meng]ajukan *electronic visa on arrival* langsung melalui evisa.imigrasi.go.id," terang Agato yang juga hadir dalam festival tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Atase Imigrasi KJRI Los Angeles Feddy Mulyana Pasya mengatakan bahwa kegiatan WOW Indonesia! Festival 2024 di Washington D.C. merupakan titik awal yang sangat baik untuk memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia ke dunia.

"WOW Indonesia! Festival 2024 adalah festival Indonesia terbesar di AS. Festival ini diselenggarakan untuk

memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Selain instansi pemerintah dan BUMN, acara ini juga diramaikan oleh ratusan UMKM asal Indonesia yang menarik animo pengunjung dari sekitar Washington D.C. dan kota lain di AS," ujar Feddy.

Shane dan Allice, suami-istri yang mengunjungi gerai Golden Visa Indonesia, menyatakan kecintaannya terhadap seni bela diri asli Indonesia, pencak silat, meskipun belum pernah berkunjung ke Indonesia. Mereka berharap dapat datang ke Indonesia dalam waktu dekat. "Kami juga tertarik dengan informasi tentang *golden visa* dan akan melihat bagaimana selanjutnya," ujar Allice.

Di WOW Indonesia! Festival 2024 Washington D.C., pengunjung juga dapat menikmati panggung hiburan yang diisi bintang-bintang kenamaan Indonesia. Karnaval kostum dan kesenian Indonesia di Pennsylvania Avenue tak pelak menarik perhatian seluruh pengunjung festival.

"Ditjen Imigrasi terus melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan kebijakan *golden visa* di berbagai kesempatan yang strategis dan potensial. Ini untuk mendorong peningkatan ekonomi Indonesia melalui investasi," pungkas Dirjen Imigrasi. ■



Judul Buku : *Bersorak Bahagia: Sebuah Buku tentang Menemukan Diri*
 Penulis : Langit Biru
 Penerbit : Grasindo
 Tahun Terbit : 2022
 Halaman : 142 halaman

JALANI PENCARIAN KEBAHAGIAAN DALAM BERSORAK BAHAGIA

Kebahagiaan sering dijadikan tujuan akhir. Padahal, kebahagiaan adalah sebuah perjalanan. Lalu, bagaimana menjalani perjalanan tersebut agar hidup lebih bermakna?

■ Penulis: Fipit Fatimah

Buku *Bersorak Bahagia: Sebuah Buku tentang Menemukan Diri* yang berkategori pengembangan diri ini ditulis oleh penulis bernama pena Langit Biru. Penulis menuangkan pikirannya bahwa setiap permasalahan yang hadir dalam hidup harus kita hargai sebagai pengalaman berharga yang penuh makna. Permasalahan tersebut akan membentuk kita menjadi manusia yang lebih kuat dalam menghadapi perjalanan panjang berikutnya.

Alur Cerita dalam Empat Bagian

Alur cerita dalam buku ini secara garis besar dapat dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, pentingnya bersyukur. Penulis mengajak pembaca untuk mengapresiasi hal-hal kecil dalam hidup. Dengan pandangan ini, pembaca diharapkan dapat menciptakan rasa syukur dalam diri dan menemukan kebahagiaan yang lebih dalam.

Kedua, menghadapi tantangan. Langit Biru berbagi pengalaman pribadi dan cerita tentang orang-orang yang telah berhasil mengatasi berbagai rintangan hidup dengan menekankan sifat positif dan berani untuk melangkah maju walaupun dalam keadaan yang sulit.

Ketiga, hubungan yang sehat dan kebahagiaan. Penulis menjelaskan

bagaimana hubungan dengan orang lain dapat berkontribusi terhadap kebahagiaan kita. Ia juga memberikan tip untuk membangun hubungan yang sehat dan suportif.

Keempat, kreativitas dan ekspresi diri. Langit Biru menyoroti pentingnya kreativitas dalam mencapai kebahagiaan diri. Ia mendorong pembaca untuk menemukan cara baru dalam mengekspresikan diri melalui seni, hobi, atau kegiatan lainnya.

Kelebihan dan Kekurangan Buku

Buku ini memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya berharga untuk dibaca. Salah satunya adalah pesan yang inspiratif. Buku ini mengandung banyak pesan positif yang bisa memotivasi pembaca untuk mencari kebahagiaan dalam hidup.

Selain itu, penjelasan dalam buku ini disampaikan dengan praktis dan aplikatif. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penulis memberikan penjelasan tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Hal ini membantu pembaca dalam menemukan perspektif lain dalam menghadapi masalah.

Gaya penulisan yang ringan membuat penyajian Langit Biru mengenai hal-hal yang kompleks terasa mengalir sehingga pembaca betah membaca hingga akhir. Sudut

pandang yang digunakan pun menarik. Melibatkan pembaca sebagai tokoh utama dengan peran yang beragam menjadikan buku ini lebih interaktif.

Namun, selain kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Penulis terlihat terlalu optimistis dalam menggambarkan hasil akhir penyelesaian masalah. Hal ini dapat memicu tertutupnya alternatif lain bagi pembaca dalam menyelesaikan masalah.

Relevan dengan Kehidupan

Buku Bersorak Bahagia: Sebuah Buku tentang Menemukan Diri dapat menjadi alternatif bacaan bagi penggemar buku kategori pengembangan diri dengan gaya bahasa yang ringan. Buku tentang pencarian kebahagiaan ini cocok dibaca di tengah hiruk pikuk kehidupan yang beriringan dengan masifnya perkembangan media sosial, tetapi pada saat yang sama justru ada banyak orang yang merasa "kesepian".

Langit Biru berhasil memberikan sudut pandang lain bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang harus ditekuni dengan penuh rasa syukur dan kesadaran. Dengan begitu, hal-hal yang dianggap sebagai kesedihan dapat berubah menjadi perjalanan hidup yang penuh dengan pengalaman berharga. ■



Dirjen Imigrasi memimpin upacara gelar pasukan Jagratara di Pelabuhan Benoa, Denpasar. (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Dirjen Imigrasi melakukan wawancara singkat di konter tempat pemeriksaan imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (Foto: Habil Ashari)



Pengambilan foto paspor Dirjen Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Beberapa warga negara asing sedang melintasi autogate di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. (Foto: Arif Rahman Suryaman)



Sambutan Dirjen Imigrasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester I di Mövenpick Hotel Jakarta City Centre (Foto: Tommy Ariyanto)



Dirjen Imigrasi menjadi petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. (Foto: Aditja Pratama Gegana Uwen)

AUTOGATE KINI BISA UNTUK ANAK 6 TAHUN





Layanan Urus Paspor Kolektif

di Kantor, Kampus, Komunitas, atau Kompleks Perumahan Kamu

Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor imigrasi terdekat



URUS PASPOR CEPAT, SATSET, DAN BISA SAMBIL NGE-MALL DI *Immigration Lounge*

Tersedia di **3 lokasi di Jakarta**

Melayani **permohonan percepatan paspor elektronik**
(permohonan baru dan penggantian paspor)

- **Pondok Indah Mall 3, Lantai B2**

Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB

- **Mall Taman Angrek, Lantai LG**

Senin-Jumat pukul 10.00-18.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 10.00-14.00 WIB

- **Senayan City, Lantai 6**

Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB
Sabtu-Minggu pukul 08.00-14.00 WIB

Ajukan permohonan
dan daftar melalui
aplikasi M-Paspor

Biaya

- Paspor Elektronik **Rp650.000**
- Tarif Percepatan **Rp1.000.000**



Unduh sekarang di

